

**STRUKTUR RELASI GENDER DALAM PROGRAM
KELOMPOK WANITA TANI (KWT)
(Studi di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kecamatan Banjar baru,
Kabupaten Tulang Bawang)**

(Skripsi)

**Oleh
SILVIA LAZULKA PUTRI**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI
2017**

ABSTRACT

THE STRUCTURE OF GENDER RELATIONS IN WOMEN FARMERS GROUP (KWT) PROGRAM

(A Study in Panca Karsa Purna Jaya village, sub-district of Tulang Bawang)

By

Silvia Lazulka Putri

This research aims to find out the background of the problem of women participation in women farmers group (KWT) program, to investigate the decision making patterns in family of KWT participants, and to determine the effect of KWT program towards gender relations in household scale. The informants were chosen by purposive sampling technique; there were 9 informants consisted of 5 members of women farmers group and 4 husbands of the members. Based on the results of the research, there were several factors behind the participation of women in KWT program, included; External factors (social conditions) and internal factors (self desires). The decision-making pattern in the families of KWT members showed that not every member of KWT was involved in the decision-making process in the household, but the women involved in the decision-making process emphasized that the final decision of each decision-making was decided by the husband while the domestic interest was decided by women themselves. Based on the results of the research, the KWT program did not change the pattern of gender relations in the household. The visible impact of KWT program is the socio-economic development of KWT members who are getting close to each other because of regular meetings, however the community did not benefit from any increasing income of the program, but the members benefitted from being able to meet the family's nutritional needs without having to pay expensive fees.

Keywords: gender relations, decision making, women participation, KWT program

ABSTRAK

STRUKTUR RELASI GENDER DALAM PROGRAM KELOMPOK WANITA TANI (KWT)

**(Studi di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kecamatan Banjar Baru,
Kabupaten Tulang Bawang)**

**Oleh
Silvia Lazulka Putri**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang melatarbelakangi partisipasi perempuan dalam program KWT, pola pengambilan keputusan pada keluarga peserta program KWT dan dampak program KWT terhadap relasi gender skala rumah tangga. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive, sehingga diperoleh 9 informan yang terdiri dari 5 anggota KWT dan 4 suami anggota KWT. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa beberapa hal melatarbelakangi partisipasi perempuan dalam KWT yaitu; faktor eksternal (kondisi sosial) dan faktor internal (keinginan diri sendiri). Pada pola pengambilan keputusan keluarga anggota KWT ditemukan bahwa tidak semua perempuan anggota KWT dalam rumah tangganya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, namun perempuan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan menekankan bahwa keputusan akhir setiap pengambilan keputusan tetap diputuskan oleh suami, sedangkan untuk memutuskan keperluan domestik (dapur) diputuskan sendiri oleh perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, KWT tidak memberi perubahan terhadap pola relasi gender dalam rumah tangga. Dampak KWT yang terlihat adalah perkembangan sosio-ekonomis para anggota KWT yang semakin akrab karena pertemuan yang rutin, sedangkan dampak ekonomisnya masyarakat tidak menerima dengan meningkatnya pendapatan, namun dengan dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal.

Kata kunci: Relasi gender, pengambilan keputusan, partisipasi perempuan, program KWT

**STRUKTUR RELASI GENDER DALAM PROGRAM
KELOMPOK WANITA TANI (KWT)**

**(Studi di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kecamatan Banjar baru,
Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh

SILVIA LAZULKA PUTRI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

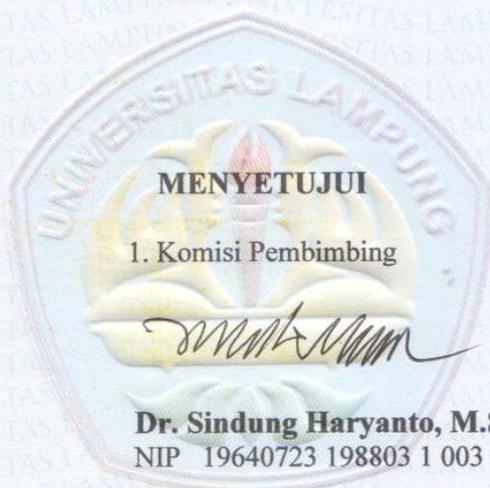
Judul Skripsi : **STRUKTUR RELASI GENDER DALAM
PROGRAM KELOMPOK WANITA TANI (KWT)
(Studi di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kecamatan
Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang)**

Nama Mahasiswa : **Silvia Lazulka Putri**

No. Pokok Mahasiswa : **1216011085**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Sosiologi

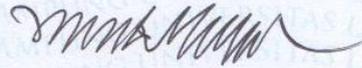
Drs. Ikram, M.Si.

NIP 19610602 198902 1 001

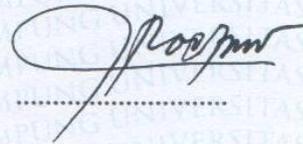
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

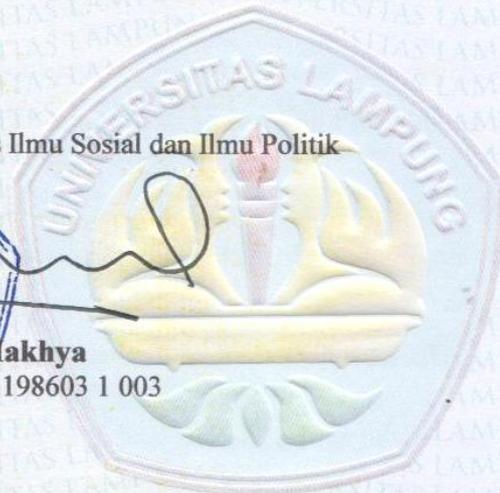
Ketua : **Dr. Sindung Haryanto, M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Erna Rochana, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juli 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Silvia Lazulka Putri

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Silvia Lazulka Putri. Lahir di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 17 Februari 1995. Penulis merupakan anak pertama, dari pasangan Bapak Suhaili Aka Diansyah dan Ibu Murnayati.

Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis :

1. Taman Kanak-Kanak PGRI Candimas Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung
2. Sekolah dasar Negeri 01 Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Agung,
Kabupaten Tulang Bawang
3. SMP Negeri 1 Banjar Agung, Tulang Bawang
4. SMA Negeri 1 Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang
Bawang Barat

Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi melalui jalur SNMPTN

Tulis. Pada Januari 2015 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2017 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Struktur Relasi Gender dalam Program Kelompok Wanita Tani (KWT) (Studi di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang)”.

Motto

**Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain
(Michel De Montaigne)**

**Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan namun bagaimana bertanding dengan baik
(Baron PierreDe Coubertin)**

**Nilai dari seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggung Jawab, mencintai hidup dan pekerjaannya
(Kahlil Gibran)**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kelancaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan nabi kita, Nabi akhir zaman, Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir. Ku persembahkan Skripsi Ini kepada:

Ayah dan Bunda tersayang dan tercinta, terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang telah diberikan. Tak ada yang bisa menggantikan pengorbanan kalian, semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan pada ayah dan bunda.

Semua keluargaku, mamas dan mbak yang selalu memberikan nasihat dan saran demi kelancaran Skripsi ini.

Semua teman-teman Sosiologi 2012, Terimakasih atas perhatian, bantuan, dan dukungan kalian semua semoga Allah melancarkan usaha kita

Almamater Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamu'alaykum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan syarat pencapaian gelar sarjana sosiologi. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul “Struktur Relasi Gender dalam Program Kelompok Wanita Tani (KWT) (Studi di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari peran bantuan, bimbingan, saran dan kritik dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan keyakinan pada Allah SWT yang bisa membalasnya, penulis ini mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Ikram, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Sindung Haryanto, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama yang selalu mendukung, membantu, dan sabar memberi masukan serta nasehat dari masa perkuliahan sampai proses bimbingan hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si selaku Penguji Utama yang selalu memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen FISIP Unila yang telah membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis, serta staf jurusan yang sudah banyak membantu.
7. Ayah dan bunda tercinta, yang selalu mendukung dan mendo'akan untuk kebaikan, kesuksesan dan kelancaran ayuk dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk masa depan ayuk.
8. Untuk adek Ari yang bercandanya selalu bisa jadi hiburan buat ayuk, makasih ya dek. Untuk kakak-kakak sepupuku mas Tek, Mas Jum, Mba Lena, mba Um, mas Gapur, mba Dewi dan kakak-kakak sepupuku yang lainnya terimakasih untuk semua dukungan, bantuan, dan semangatnya.
9. Bapak kepala desa Panca Karsa Purna Jaya dan anggota KWT, terima kasih atas kemudahan yang diberikan ketika saya melakukan penelitian baik masukan, arahan serta kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
10. Terimakasih untuk laela kurnia, mba safitri, ika, tini, yang udah nemenin dikampus dari awal kuliah sampe akhirnya lulus satu persatu, kerja, nikah dan punya anak, semoga komunikasi kita bisa tetep terjaga.
11. Untuk temen-temen Sosiologi 2012 Anggi, Puspita, Way way, Tedi, Sandy dan semua temen-temen Sos 12 yang tidak bisa disebut satu-persatu terimakasih untuk semua bantuan dan semangatnya.

12. Untuk Yeni sahabat yang ketemu diawal kuliah, makasih untuk semua bantuan dan semangat yang selalu dikasih, makasih untuk hal-hal gila yang banyak kita lakuin dari awal masa kuliah sampe akhirnya lulus.
13. Untuk temen-temen KKN, Nedy, James, Bang Bram, Kokol, Yesti, Eva, Ayu
14. Untuk temen-temen dari FKIP Reta, Ana makasih ya semangatnya
15. Untuk temen-temen kosan Wong Kito makasih untuk semangat yang selalu kalian kasih, vini, devi, desti, maya, frida, dan lainnya yang ngga bisa disebut satu persatu
16. Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat.

Bandar Lampung, 25 September 2017
Penulis

Silvia Lazulka Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Strategi Pembangunan Gender	17
B. Tinjauan tentang Pemberdayaan Perempuan	22
C. Tinjauan Tentang Ketidakadilan Gender	26
D. Tinjauan Tentang Dampak Pemberdayaan Perempuan	31
E. Tinjauan tentang Kelompok Wanita Tani (KWT)	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Penetapan Informan	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisa data	50
G. Validitas dan Reliabilitas data	52

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Panca Karsa Purna Jaya	55
B. Letak Desa Panca Karsa Purna Jaya	57
C. Keadaan Penduduk (Demografi).....	58
D. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Panca Karsa Purna Jaya	65

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Partisipasi Perempuan dalam Program KWT	81
B. Pola Pengambilan Keputusan	107
C. Dampak KWT terhadap relasi gender	128

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	145
B. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indeks Ketimpangan Gender di Negara ASEAN 1995-2011	4
2. Penelitian Terdahulu	42
3. Nama kepala Desa yang pernah menjabat sebagai kepala Desa.....	56
4. Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur tahun 2015.....	60
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Panca Karsa Purna Jaya per tahun 2015.....	61
6. Mata Pencarian Penduduk Desa Panca Karsa Purna Jaya per Tahun 2015	63
7. Identitas Informan Berdasarkan Umur dan Pekerjaan	70
8. Proses pengambilan keputusan dalam keikutsertaan pada program KWT	83
9. Perbandingan antara teori pilihan rasional dan realita di masyarakat.....	97
10. Perbandingan teori struktural fungsional dengan realita di masyarakat ...	106
11. Perbandingan teori feminisme dan realita di masyarakat	126
12. Hasil dari Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pertahun (Hasil Panen dijual Seluruhnya)	138
13. Perbandingan teori feminisme dan realita di masyarakat	141
14. Perbandingan Sebelum Mengikuti Program KWT dan Setelah Mengikuti Program KWT	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut ijazah yang dimiliki, jenis kelamin dan tempat tinggal, 2011	5
2. Indeks ketimpangan dan rasio perempuan dan laki-laki di parlemen Negara ASEAN, 2011	5
3. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin	59
4. Persentase keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	62
5. Persentase keadaan penduduk menurut mata pencaharian	64
6. Persentase jumlah penduduk menurut agama	64
7. Persentase intensitas kehadiran anggota dalam kegiatan KWT.....	87
8. Persentase motivasi yang mendasari keikutsertaan dalam program KWT	98
9. Persentase pembagian peran suami isteri.....	108
10. Persentase pola pengambilan keputusan dalam tata laksana rumah tangga.....	113
11. Persentase pola pengambilan keputusan untuk keikutsertaan dalam kegiatan sosial	121
12. Persentase pola relasi gender suami isteri.....	129
13. Persentase peran perempuan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.....	132
14. Persentase dampak KWT terhadap kesejahteraan anggota keluarga	136

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, BPS (2015), yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Menurut BPS (2015) dan Fakhri (dalam Efianingrum, 2008) perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Menurut Vries, (2006), ketidakadilan gender terjadi manakala seseorang diperlakukan berbeda (tidak adil) berdasarkan alasan gender, sehingga menyebabkan terjadi kesenjangan yang terjadi karena adanya diskriminasi dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan (Kemen PP dan PA, 2012).

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti : marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), sosialisasi ideologi nilai peran gender, (BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional); Kemneg PP(Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 2012;

UNFPA, (2005); Vries (2006); Mosse (1996), serta kekerasan Fakhri (Efianingrum, 2008). Dijelaskan sebagai berikut:

1. Marginalisasi perempuan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dapat menyebabkan kemiskinan hal ini banyak terjadi di negara berkembang. Pemiskinan perempuan yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh gender. Contohnya: intensifikasi pertanian yang memfokuskan pada petani laki-laki menyebabkan pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin.
2. Subordinasi merupakan keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting di banding jenis kelamin lainnya. Contohnya: seorang isteri yang hendak bepergian keluar harus meminta izin suami, sedangkan kalau suami yang akan pergi tidak perlu meminta izin isteri.
3. Pandangan stereotip adalah citra atau pandangan tentang individu atau kelompok tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Seperti pelabelan negative yang menyebabkan diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan. Contohnya: apabila seorang lelaki marah dianggap tegas, tapi apabila perempuan marah dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Hal ini disebabkan standar nilai terhadap perilaku laki-laki dan perempuan berbeda, namun standar nilai tersebut lebih banyak menghakimi dan merugikan perempuan.
4. Kekerasan, merupakan terjemahan dari *violence*, yang artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik seperti perkosaan,

pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual yang menyebabkan emosional terusik.

5. Beban ganda merupakan bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin secara berlebihan. Contohnya: pada umumnya beberapa pekerjaan rumah tangga sebagian dikerjakan oleh laki-laki dan sebagian lagi oleh perempuan, namun kenyataannya dari berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, Marzuki (2011); Wariyanto (2003); Muthali'in (2001); dan Mosse (1996).

Ketidakadilan gender terjadi hampir di seluruh dunia dan perempuan menjadi kelompok mayoritas yang menerima dampak ketidakadilan. Fakta-fakta yang tercatat dalam *Human Development Report UNDP 2001/2002* tentang ketidakadilan yang diterima perempuan antara lain: di seluruh dunia, dari jumlah 1.3 miliar penduduk miskin 70% adalah perempuan, sejumlah 50% perempuan tidak bisa membaca dibanding laki-laki, jumlah penduduk yang menderita gizi buruk lebih banyak perempuan daripada laki-laki, gaji perempuan 30-40% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam posisi pekerjaan yang sama, di negara-negara berkembang perempuan hanya menduduki kurang dari sepertujuh posisi administrator dan manager dan perempuan hanya menduduki 10% kursi kabinet nasional dunia dan yang terakhir perempuan tidak mendapat akses yang sama dengan laki-laki terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, hasil bumi/laut, pekerjaan, dan lain-lain.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Human Development Report* (HDR) (dalam Kemen PP dan PA, 2012), dalam kurun waktu 15 tahun telah terjadi penurunan indeks ketimpangan gender di kawasan Negara-negara ASEAN (*Association of South East Asian Nations*).

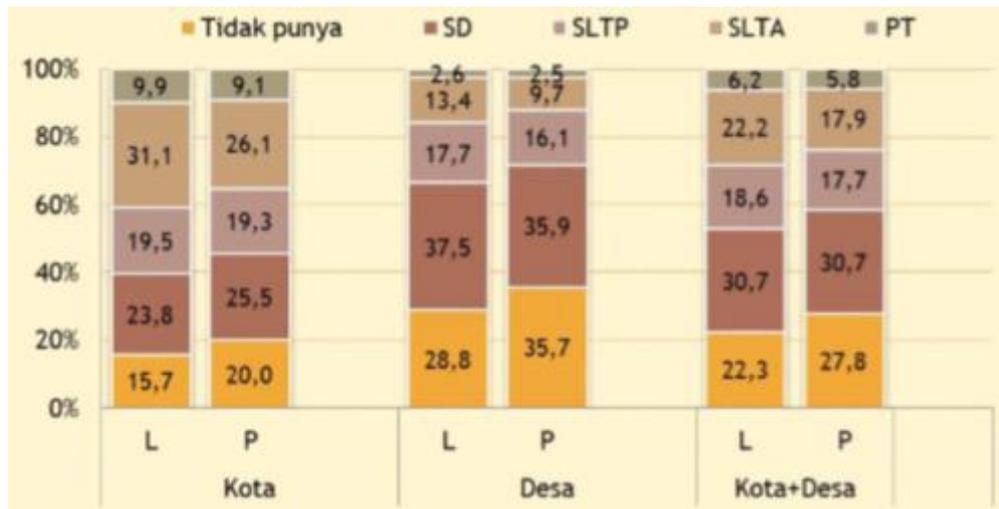
Tabel 1. Indeks Ketimpangan Gender di Negara ASEAN 1995-2011.

Negara	Tahun			
	1995	2005	2008	2011
Singapura	0.20	0.19	0.10	0.10
Malaysia	0.35	0.34	0.33	0.34
Vietnam	0.39	0.35	0.33	0.35
Thailand	0.45	0.40	0.39	0.40
Filipina	0.50	0.49	0.42	0.44
Indonesia	0.60	0.58	0.55	0.55
Kamboja	0.62	0.58	0.55	0.55
Laos	0.80	0.58	0.55	0.50

Sumber: HDR dalam (KEMEN PP dan PA, 2012)

Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan ketimpangan akibat adanya perbedaan gender. Penurunan yang signifikan terjadi di Negara Laos dimana pada tahun 1995 IKD (Indeks Ketimpangan Gender) tercatat sebesar 0,80 menurun menjadi 0,50 pada tahun 2011. Indonesia juga mempunyai IKD yang hampir sama dengan Kamboja dan Laos yang termasuk pada kategori tertinggi di kawasan ASEAN. Untuk tahun 2011 negara dengan nilai IKD terendah adalah Singapura.

Berikut beberapa gambaran tentang ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki yang diungkapkan Efianingrum (2008):



Gambar 1. Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut ijazah yang dimiliki, jenis kelamin dan tempat tinggal, 2011

Sumber: BPS (dalam Kemen PP dan PA, 2012)

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas, masih terdapat 27,8 persen yang tidak mempunyai ijazah, lebih besar daripada laki-laki yaitu 22,3 persen.



Gambar 2. Indeks ketimpangan dan rasio perempuan dan laki-laki di parlemen Negara ASEAN, 2011

Sumber: HDR (dalam Kemen PP dan PA, 2012)

Dari gambar tersebut, rasio keterwakilan perempuan terhadap laki-laki di parlemen di Negara ASEAN pada tahun 2011 terlihat berbanding terbalik dengan nilai indeks ketimpangan gender di Negara yang bersangkutan. Banyak penyebab dari rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen misalnya adanya pemikiran bahwa tanggung jawab pengasuhan anak sepenuhnya ada pada perempuan (Kemen PP dan PA, 2012). Heines (dalam Kemen PP dan PA, 2012) mengatakan bahwa pemikiran tersebut berakibat pada banyaknya perempuan yang tinggal di rumah yang akibat jangka panjangnya adalah tidak banyak perempuan yang berinteraksi secara publik.

Kesehatan Reproduksi.

Resiko kematian ibu saat melahirkan masih relatif tinggi di Indonesia karena pencapaian pembangunan kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Data SDKI yang menyatakan bahwa tren angka kematian ibu Indonesia meningkat tajam dibanding tahun 2007. Tahun 2014, Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi pada 2007, sebesar 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SDKI Lampung, 2014). Kondisi ini merupakan suatu tantangan yang berat jika merujuk pada target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup di 2015 (dalam BAPPENAS, 2012).

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem (Muthali'in, 2001).

Menurut Mulia (2003), ketidaksetaraan gender juga dapat menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan yang akan merugikan masyarakat baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang akan memiliki dampak terhadap kemampuan mereka meningkatkan taraf kehidupan. Ketidaksetaraan gender juga mengurangi produktifitas dalam usaha sehingga mengurangi prospek mengentaskan kemiskinan dan kemajuan ekonomi. Ketidaksetaraan gender dalam laporan ini juga dapat melemahkan pemerintahan suatu negara dan dengan demikian berakibat pada buruknya efektifitas kebijakan pembangunan (King dan Madson et. al 2001)

Rieches (1990) menyimpulkan dari studi yang dilakukan oleh Marzuki (2011) tentang Gender dalam Perspektif Kesetaraan dan Keadilan, bahwa pemberian peran kepada pria dan wanita masih tidak didasarkan pada kemampuan individu, tetapi didasarkan atas pantas tidaknya peran tersebut bagi yang bersangkutan dilihat dari jenis kelaminnya. Pada akhirnya peran wanita cenderung dipandang nomor dua setelah pria. Akibatnya, para wanita menjadi tersisih dengan peran-peran yang marjinal dan kurang berarti dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat beberapa dampak sebagai akibat dari ketidakadilan gender seperti yang diungkapkan oleh Mulia (2003) bahwa ketidaksetaraan gender dapat menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan yang akan merugikan masyarakat baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang akan memiliki dampak terhadap kemampuan mereka meningkatkan taraf kehidupan dan juga dapat mengurangi produktifitas dalam usaha sehingga

mengurangi prospek mengentaskan kemiskinan dan kemajuan ekonomi. Kesimpulan yang didapatkan oleh King dan Madson et, al (2001) dalam laporan penelitian kebijakan Bank Dunia tahun 2000 bahwa ketidaksetaraan gender juga dapat melemahkan pemerintahan suatu negara dan dengan demikian berakibat pada buruknya efektifitas kebijakan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender maka dapat diketahui Faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender yaitu, diskriminasi gender (KEMEN HUKUM DAN HAM, KEMEN PP DAN PA, KEMENDAGRI RI (2011), kemudian tata nilai sosial budaya masyarakat yang umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideology patriarki) (Marzuki, 2011 dan Handayani & Sugiarti, 2008). Serta peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender; penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang holistik; kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekuen; rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender juga dianggap sebagai faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketidakadilan gender di masyarakat Marzuki (2011) dan juga sistem kapitalis yang berlaku di masyarakat Handayani dan Sugiarti (2008).

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam masyarakat apabila tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak lebih buruk dalam kehidupan masyarakat.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan gender antara lain: melakukan *mainstreaming* kebijakan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan (Sekretaris Negara RI, 2001), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam (Marzuki, 2011) juga telah melaksanakan program langkah konkrit, yaitu program yang disusun terdiri dari program dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan upaya peningkatan kemampuan. Mencakup Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; Program Peningkatan Peran Masyarakat Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; Program Sumber Daya, Sarana dan Prasarana. Mengingat produk tersebut merupakan undang-undang, maka untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi komitmen bersama.

Berbagai program yang dilaksanakan pemerintah tersebut memiliki kelemahan yaitu program yang terlalu berpusat pada perempuan. Asumsi yang digunakan dalam program-program tersebut adalah kondisi dan posisi perempuan yang tidak menguntungkan, sehingga melalui program-program tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakadilan gender.

Penelitian yang dilakukan Haryanto (2015) menyimpulkan bahwa program-program pembangunan masih sangat kuat terpengaruh model pembangunan WID (*Women in Development*) yang menekankan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

WID (*Women in Development*) Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan peluang sebesar-besarnya bagi perempuan ikut dalam pembangunan. Penelitian yang dilakukan Pasaribu (2009) dijelaskan bahwa fokus WID adalah perempuan dengan asumsi permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan dan hal tersebut mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum lelaki dalam masyarakat termasuk dalam pembangunan.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program yang terpengaruh model pembangunan WID. Pemerintah mengejar target pembangunan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam program tersebut. Sementara menurut Haryanto (2015), upaya untuk meningkatkan partisipasi pria dalam program tersebut jauh dari memadai, hingga saat ini pun peran laki-laki dalam program KB di Indonesia masih rendah dan jika dibandingkan dengan Negara-negara lain, Indonesia sangat tertinggal.

Program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu berjalan lancar, terdapat beberapa kendala yang menghalangi program pembangunan tersebut. Beberapa kendala tersebut antara lain: beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik (KEMEN PP

dan PA, 2013). Menurut Efianingrum (2008), dalam kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari diskriminasi yang luas dan kekerasan terhadap perempuan di semua bidang, termasuk pendidikan, masih sering terjadi seperti budaya yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki ketimbang anak perempuan.

Beberapa kritik yang terkait dengan program-program kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketidakadilan gender selama ini seperti hasil studi Noerhadi (1998); Darwin dan Kusumasari (2002); serta Riyono (1997) sebagai berikut:

1. Program-program yang diterapkan selama ini bersifat sentralistik, artinya program-programnya sama sesuai dengan kebijakan dari pusat, padahal kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di masing-masing provinsi sangatlah berbeda yang sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi perempuan yang bersangkutan;
2. Selama ini kajian tentang gender lebih banyak atau boleh dikatakan sebagian besar hanya mengkaji perempuan, sehingga akan ada kemungkinan kesimpulan menjadi bias karena seolah-olah menyimpulkan sesuatu secara sepihak.
3. Pembicaraan mengenai kesetaraan dan keadilan gender boleh dikatakan hanya diketahui oleh mereka yang berkecimpung di bidang tersebut, dan mungkin juga mereka yang berpendidikan cukup tinggi.
4. Dalam tulisan-tulisan mengenai perempuan khususnya bagi mereka yang bekerja, sering diwacanakan dan ditulis bahwa terjadi diskriminasi pengupahan terhadap perempuan.

5. Dalam studi gender seyogyanya juga melibatkan laki-laki dalam usaha peningkatan kesadaran dan aktualisasi mereka agar ikut juga berperan ganda. Contohnya dalam masalah kesehatan reproduksi selama ini selalu menekankan pada perempuan, di sini juga sebenarnya sangat diperlukan partisipasi laki-laki sebagai pasangan.
6. Dikatakan pula bahwa belum ada kesadaran dari pembuat kebijakan atau pimpinan birokrasi publik akan pentingnya PUG dalam kebijakan yang dibuat, koordinasi antar instansi terhadap program pemberdayaan perempuan sering tumpang tindih, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah belum siap untuk melaksanakan PUG dengan baik.
7. Memperhatikan konsep bekerja bagi perempuan di sektor publik selama ini selalu berkaitan dengan jumlah kompensasi yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak memberikan nilai secara ekonomi bagi pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan oleh isteri, padahal kalau pembantu rumah tangga yang mengerjakannya dapat dinilai dengan uang.
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan beserta jajarannya dapat merancang program atau kegiatan untuk melakukan sosialisasi atau advokasi ke perusahaan-perusahaan swasta mengenai kesetaraan gender, sehingga dapat mempertimbangkan kesetaraan gender dalam penunjukan jabatan atau kegiatan promosi karyawan.

Kritik tentang berbagai program yang dibuat pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan gender juga diungkapkan oleh Nurhaeni (2014), dalam hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan

pemerintah tersebut dapat meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam pembangunan, tetapi tidak dalam tingkat keberdayaan mereka.

Kelompok wanita tani merupakan merupakan suatu perkumpulan ibu-ibu tani atau perempuan di pedesaan yang memiliki aktivitas berupa kegiatan pertanian atau kegiatan lain untuk meningkatkan kesetaraan gender. Program kelompok wanita tani resmi dimulai pada tahun 2005 di Kabupaten Tulang Bawang.

Tanggung jawab wanita untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya didukung oleh pendapat Sukiyono, et al, (2008,) yang menjelaskan bahwa Akses pangan rumah tangga yang bergantung pada apakah rumah tangga mempunyai cukup pendapatan untuk membeli pangan pada harga yang berlaku, atau mempunyai cukup lahan atau sumber lain untuk berusaha tani pangan yang dibutuhkan (Sukiyono, et al, 2008).

Program Kelompok Wanita Tani (KWT), dalam beberapa penelitian disebutkan telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Aceh, Bogor, Kudus, Sleman, Padang, Bengkulu, dan beberapa daerah lain (Strempelel (2011); Hidayah (2012); Sari (2011); Aini (2013). Di Aceh, program KWT dilaksanakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NAD (BPTP) yang bermitra dengan *Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR), yang bertujuan memulihkan usaha pertanian di Aceh, mitra lain dari program KWT di Aceh adalah *Industry & Investment NSW*, Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian dan Balai Penelitian Tanah (Strempelel, 2011).

Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk membantu para perempuan dalam mengelola usaha pertanian. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk usaha penyetaraan gender yang diupayakan oleh kelompok wanita tani. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa perempuan juga dapat ikut andil dalam bidang pertanian, selain itu dengan pemberdayaan melalui KWT perempuan diharapkan bisa mendapatkan penghasilan dari hasil pertaniannya sehingga dapat mengurangi ketergantungan isteri terhadap suami. Masing-masing kelompok wanita tani memiliki anggota yang berjumlah sekitar 10-25 orang perempuan yang bekerja sama untuk menanam sayuran di pekarangan rumahnya. Hasil dari pelaksanaan program KWT di beberapa tempat yang berbeda cenderung sama, yaitu dapat meningkatkan keadaan ekonomi dalam keluarga (Strempelel (2011); Hidayah (2012); Sari (2011); Aini (2013)).

Menurut Strempelel (2011), terdapat beberapa manfaat yang diperoleh masyarakat dari melalui program KWT , antara lain: 1). dampak sosial yang berupa peningkatan kualitas hidup perempuan, 2). dapat mengatasi persoalan gender, 3). dampak ekonomi yang melalui program pemberdayaan secara finansial, 4). ketersediaan pangan, hal ini merupakan prioritas utama baik di tingkat lokal, maupun global dan dalam hal ini difokuskan pada perempuan untuk menangani tantangan kesediaan pangan ini, 5). perbaikan kesehatan dan gizi di dalam rumah tangga, 6). dampak lingkungan, dalam program KWT anggotanya tidak dianjurkan menggunakan bahan kimia untuk merawat tanamannya karena akan merusak lingkungan.

Beberapa kondisi menyebabkan dapat menyebabkan meningkatnya partisipasi perempuan untuk mengikuti program KWT, seperti beberapa dampak positif yang ditawarkan, yaitu dampak sosial, ekonomi, membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga, menjamin ketersediaan pangan, dan dampak positif bagi lingkungan.

Program KWT ini idealnya mampu memperbaiki posisi tawar perempuan dengan keuntungan yang didapatkan oleh perempuan seperti memiliki pendapatan sendiri yang berarti berkurangnya ketergantungan isteri terhadap suami, sehingga isteri dapat ikut ambil bagian dalam membuat keputusan bagi keluarganya. Berlawanan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, perempuan tidak memiliki peran dalam mengambil keputusan bagi keluarganya hal ini disebabkan perempuan tidak memiliki pendapatan sendiri, sehingga perempuan selalu bergantung pada suaminya dan tidak berani mengeluarkan pendapatnya mengenai keputusan yang akan diambil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka didapatkan suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Kondisi apa yang melatar belakangi partisipasi perempuan dalam program KWT?
2. Bagaimana pola pengambilan keputusan pada keluarga peserta program KWT?
3. Bagaimana dampak program KWT terhadap relasi gender skala rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi yang melatarbelakangi partisipasi perempuan terhadap program KWT.
2. Untuk mengetahui pola pengambilan keputusan pada keluarga peserta program KWT.
3. Untuk mengetahui dampak program KWT terhadap relasi gender skala rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1. Dalam aspek teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Sosiologi. Dan diharapkan dapat menjelaskan dampak program pembangunan atau pemberdayaan perempuan terhadap relasi gender.

2. Dalam aspek praktis (terapan)

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi pengambil kebijakan dalam menangani masalah ketidakadilan gender di masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi Pembangunan Gender

Pembangunan pada awalnya sering menjadi pertanyaan, karena seperti Boserup dan Anan (Saptandari, 1999) yang menyatakan bahwa sebetulnya pembangunan lebih banyak merugikan kaum perempuan daripada menguntungkan, sehingga dalam konteks ini pembangunan dimaknai sebagai pemberdayaan.

Beberapa pendekatan tentang strategi pembangunan gender telah dilakukan sebelumnya dimana awalnya yang ditekankan adalah wanita (Saptandari, 1999). Menurut Saptandari, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam *Women in Development* (WID), yaitu:

1. Pendekatan kesejahteraan, dalam pendekatan kesejahteraan wanita dianggap sebagai objek pembangunan;
2. Pendekatan kesamaan;
3. Pendekatan anti-kemiskinan, dan lain-lain.

Beberapa pendekatan ini dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan perempuan sendiri, hingga muncullah pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan pemberdayaan.

Pendekatan WID pada awalnya merupakan pandangan Neo-Marxist yang berpijak pada pandangan feminis yang kuat pada analisis kelas sosial dan eksploitasi di negara dunia ketiga (Kertati, 2015).

WID adalah pendekatan yang menaruh perhatian yang lebih besar pada perempuan dalam kebijakan pembangunan dan peningkatan ketrampilan yang menekankan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan mereka dalam proses pembangunan (Reeves & Baden, 2000). Dalam kajian yang didanainya, melalui WID Bank Dunia berharap untuk membawa perubahan dalam persepsi masyarakat tentang peran perempuan. Beberapa program-program yang termasuk dalam kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia antara lain: 1. Mempromosikan kesehatan ibu dan meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB), dan memperluas sistem distribusi kontrasepsi; 2. Mengembangkan informasi, pendidikan dan komunikasi (IEC) strategi dan memperkuat kampanye pendidikan berkelanjutan pada pertanian, kesehatan, keluarga berencana dan gizi.

Pendekatan pemberdayaan diasumsikan untuk memperbaiki posisi perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya dan mampu merubah posisi tawar perempuan sehingga dapat merubah nasibnya sendiri (Saptandari, 1999). Dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan pemberdayaan perempuan tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan tapi juga sebagai pelaku pembangunan yang dapat menyuarakan sendiri apa yang mereka butuhkan bukan hanya sebagai penerima bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Sejak awal 2000 pemerintah menggunakan pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi yang mengintegrasikan konsep kesetaraan dan keadilan gender ke dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah sebuah strategi nasional dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) (Kertati, 2015). Setelah sebelumnya pemerintah sempat menggunakan strategi WID (*Women in Development*) dan WAD (*Women and Development*), strategi PUG muncul sebagai kritik dari WAD yang saat itu belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang peduli gender.

Selain beberapa pendekatan pembangunan di atas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 27/KEP/MEN.PP/IV/2005 tentang Penetapan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2005-2009, telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).

Tujuan dan sasaran dari terbentuknya Renstra ini adalah:

1. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan;
2. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan perempuan;

3. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan anak;
4. Melembagakan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA);
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
6. Meningkatkan kerjasama antar lembaga tingkat nasional, regional dan internasional dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
7. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;
2. Terwujudnya kebijakan pembangunan perlindungan perempuan;
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan perlindungan anak;
4. Terwujudnya kebijakan pembangunan yang responsif gender;
5. Terwujudnya kebijakan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam pembangunan PP dan KPA;
6. Terwujudnya perjanjian antar lembaga; dan
7. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti yang dimaksud, telah ditetapkan 5 program yang beserta tujuannya masing-masing, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

3. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah.

4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuan program ini adalah untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

5. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan yang Baik

Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Strategi pembangunan gender yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya berupa pendekatan yang menawarkan keuntungan bagi anggota yang berpartisipasi. Pemberdayaan sendiri bersifat *self help* (dapat dilakukan secara individual maupun kolektif) dan secara *sustainable* (berkelanjutan).

Menurut Setyoaji (2012), strategi pemberdayaan saat ini lebih bersifat mobilitas masyarakat untuk mempertahankan sumber atau bantuan pemerintah yang tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga terpeliharanya harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Pemberdayaan dinilai sebagai salah satu program yang dilakukan sebagai upaya pembangunan nasional diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menangani masalahnya sendiri (masyarakat dapat mandiri). Hal ini didapatkan apabila masyarakat telah memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang mantap, baik di mata pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok lain.

B. Tinjauan tentang Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang khususnya untuk memiliki akses terhadap sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan, mendapatkan barang serta layanan yang dibutuhkan dan partisipasi dalam proses pengembangan dan keputusan yang mempengaruhi masyarakat miskin *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), 2002-2004.

Secara umum pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri (Pasaribu, 2009).

Saptandari (2009), dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa dalam sebuah pemberdayaan apabila diasumsikan untuk memperbaiki posisi perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar-menawar dan untuk merubah sendiri nasibnya.

Selama ini terdapat dua konsep pemberdayaan yang dikenal dengan WID (*Women in Development*) dan GAD (*Gender and Development*).

1. WID (*Women in Development*)

Strategi ini merupakan strategi yang tertua yang dinamakan strategi “meningkatkan peranan perempuan” atau melibatkan kaum perempuan dalam pembangunan.

Fokusnya adalah perempuan dengan asumsi permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan dan hal tersebut mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum lelaki dalam masyarakat termasuk dalam pembangunan (Pasaribu, 2009).

2. GAD (*Gender and Development*)

Konsep ini muncul sebagai kritik dari konsep WID yang lebih memfokuskan perempuan sebagai objek pembangunan daripada sebagai pelaku pembangunan.

Strategi GAD ini lebih memfokuskan pada sistem struktur, ideologi, dan budaya yang hidup dalam masyarakat yang melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang bersumber pada keyakinan gender. Dalam strategi kedua ini letak persoalannya bukanlah kaum perempuan seperti pada strategi WID, akan tetapi letak persoalannya ditujukan kepada bagaimana menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender (Pasaribu, 2009).

Pasaribu (2009), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dengan kata lain strategi GAD ini menggunakan pendekatan dimana perempuan dan laki-laki tidak lagi dilecehkan dan memikul beban yang berlebihan, melainkan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama menjadi subyek dan sekaligus obyek pembangunan.

Pendekatan pemberdayaan itu sendiri sangat positif, lahir dari ketidakpuasan terhadap semua pendekatan yang ada, yang didasarkan pada asumsi bahwa memperbaiki posisi perempuan harus berpusat pada upaya-upaya penghapusan sub-ordinasi perempuan (Saptandari, 1999).

Menurut Sumaryadi (2005) secara konseptual, ada 3 (tiga) prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Pemberdayaan sangat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, baik pada tahapan perencanaan program, pelaksanaan program maupun pada tahap pengembangannya.
2. Pemberdayaan selalu tidak memisahkan antara fisik proyek dengan pelatihan ketrampilan.
3. Sumber dana bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat umumnya berasal dari anggaran pemerintah, partisipasi swasta dan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Putra, 2015). Hasil penelitian Putra tersebut juga diperkuat oleh pendapat dari Bustang, dkk (2008), yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui kegiatan produktif untuk meningkatkan posisi tawar mereka terhadap semua bentuk eksploitasi dan sub ordinasi.

Menurut Korten (Moeljarto, 1987), konsep pembangunan masyarakat melalui pembangunan alternatif (pemberdayaan) pada hakekatnya memiliki beberapa aspek sebagai berikut : (1) keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibuat di tingkat lokal, (2) fokus utama adalah memperkuat masyarakat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi daerah mereka sendiri, (3) memiliki toleransi terhadap perbedaan dan mengakui arti penting pilihan nilai individu dan pembuatan keputusan

yang telah terdistribusi, (4) dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan sosial dilakukan melalui proses belajar sosial (social learning) dimana individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris dan dituntut oleh kesadaran kritis individual, (5) budaya kelembagaan ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur diri sendiri (adanya unit-unit lokal) yang mengelola sendiri, (6) jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (*actor*) lokal dan unit-unit lokal yang mengelola sendiri untuk memperkuat pengawasan lokal yang mempunyai dasar luas atas sumber-sumber dan kemampuan lokal untuk mengelola sumber daya.

Pemberdayaan perempuan disimpulkan sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan agar dapat mandiri, dan dapat juga dinilai sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya dalam tawar menawar sehingga dapat menentukan keputusan yang tidak merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya. Selain itu pemberdayaan perempuan juga ditujukan agar perempuan dapat merubah sendiri nasibnya dan tidak bergantung pada orang lain.

C. Tinjauan Tentang Ketidakadilan Gender

Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses *social* dan *cultural* (Caplan 1987; Oakley 2015; Showalter 1989). Kemudian Mulia (2004), mengatakan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai

untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

BPS (2015), ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial. Sehingga menurut BPS (2015) dan Fakhri (dalam Efianingrum, 2008), perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban dari sistem tersebut. Dalam studinya Vries (2006) menjelaskan bahwa ketidakadilan gender terjadi saat seseorang diperlakukan berbeda (tidak adil) berdasarkan alasan gender, sehingga terjadi kesenjangan yang disebabkan adanya diskriminasi dari berbagai aspek.

Indonesia masih menghadapi banyak persoalan yang berkaitan dengan kesetaraan gender (Haryanto, 2015), yang dibuktikan dengan laporan OECD tahun 2010 misalnya yang menyebutkan bahwa kondisi diskriminasi gender berada pada posisi 0,13 dari skala 0-1 (medium) dengan menggunakan SIGI (*Social Institutions and Gender Index*). Persoalan yang menyebabkan buruknya kondisi kesetaraan gender tersebut antara lain tingginya angka perkawinan dini yang disertai dengan tingginya perceraian, untuk memperoleh hak milik (*property*) dan hak sipil.

Ketidakadilan gender dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana laki-laki dan perempuan dibedakan berdasarkan perannya di dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi korban dari ketidakadilan gender, sehingga mereka sama-sama merasakan diskriminasi dalam beberapa aspek kehidupan.

Menurut Efianingrum (2008), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan ketidakadilan gender, antara lain:

1. Tingkat pendidikan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki
2. Tingkat keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah
3. Rendahnya kualitas kesehatan reproduksi perempuan yang ditunjukkan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi

Persoalan AKI didukung dengan berbagai faktor yang menyebabkan tingginya tingkat AKI, antara lain: tingginya perkawinan usia dini, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan termasuk juga dalam keputusan mengenai hak reproduksi perempuan, serta berbagai mitos yang merugikan kesehatan ibu hamil.

Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik (KEMEN PP dan PA, 2013). Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah, hal ini diperkuat dengan data Susenas 2010 yang menunjukkan bahwa 13,9 persen rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2013, terdapat 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2013. Terjadi peningkatan dibandingkan data tahun sebelumnya yang terdapat 216.156 kasus kekerasan. Kasus kekerasan yang terjadi adalah kekerasan dalam relasi personal, kekerasan terhadap istri (KDRT) hingga kekerasan dalam berpacaran.

Ketidakadilan gender tidak hanya terlihat dari jumlah persentase rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani, tapi juga dari berbagai aspek lain, seperti dalam KEMEN PP dan PA (2013), yang menyebutkan bahwa ketidakadilan gender juga dapat dilihat dari:

1. Kesempatan memperoleh pendidikan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, hal ini dapat terlihat dari persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar persentasenya dibandingkan penduduk laki-laki baik di daerah perkotaan maupun perdesaan (Susenas, 2012).
2. Kesempatan untuk bekerja dan berusaha, hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase perempuan yang bekerja lebih sedikit dari laki-laki dengan persentase 47,91% untuk perempuan dan 79,57% untuk laki-laki (Sakernas, 2012). Selain itu, jumlah pekerja perempuan yang tidak dibayar sebesar 31,28% lebih besar dari pada jumlah pekerja laki-laki yang tidak dibayar yaitu sebesar 7,01%, selain itu lapangan kerja yang ada, pada umumnya lebih memprioritaskan laki-laki daripada perempuan (Sakernas, 2012)
3. Kesempatan dalam pemerintahan, data dari KPU pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Peningkatan jumlah perempuan yang duduk di kursi pemerintahan membuktikan keinginan untuk mendapatkan kesetaraan gender dengan laki-laki (BKN, 2012).

4. Produk Undang-undang terkait gender, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 45 pasal 27. Namun UU tersebut tidak mampu mengakomodir kesetaraan gender yang telah dijamin oleh UUD, karena keterbatasan akses dan partisipasi perempuan dalam penyusunan UU.

Berbagai persolan tersebut berbanding terbalik dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui program-program yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Adapun program –program tersebut antara lain: program peningkatan kualitas hidup perempuan, program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan, program peningkatan peran masyarakat dan pematapan kelembagaan PUG, dan program pengembangan dan keserasian kebijakan kependudukan (anak) (Haryanto, 2015).

Keadilan gender sangat penting bagi kehidupan, karena dengan terciptanya keadilan gender, perempuan dapat memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis (BPS, 2015).

D. Tinjauan Tentang Dampak Pemberdayaan Perempuan

Menurut Krisnawati (2014) pengadopsian program pemberdayaan perempuan akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup perempuan dalam beberapa aspek kehidupan, seperti :

1. Peningkatan kualitas pendidikan

Kualitas pendidikan dapat meningkat melalui program pemberdayaan karena melalui program pemberdayaan, perempuan dapat memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk membantu suaminya mencukupi kebutuhan hingga membantu biaya pendidikan anak-anaknya. Misalnya, apabila sebelumnya pendidikan anak di sebuah keluarga fokus pada anak laki-laki, melalui pemberdayaan masyarakat dapat menyadari pentingnya pendidikan bagi anak perempuan, sehingga anak laki-laki dan perempuan dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dalam sebuah keluarga. Contoh lain seperti pendidikan seorang anak dalam keluarga yang terpaksa harus berhenti saat SMP karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, melalui manfaat ekonomi yang di dapat ibu dari program pemberdayaan ibu dapat membantu kondisi ekonomi keluarga, sehingga anak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMA.

2. Peningkatan kualitas kesehatan

Program pemberdayaan perempuan akan membantu perempuan memahami tentang kesehatan dirinya sendiri melalui berbagai penyuluhan yang diadakan oleh program pemberdayaan, dan melalui kegiatan yang dilakukan dalam program pemberdayaan perempuan, perempuan dapat

memiliki penghasilan sendiri sehingga perempuan dapat langsung membuat keputusan mengenai kesehatannya. Seperti membuat keputusan untuk beralih model penanganan, apabila sebelumnya perempuan tidak mengambil keputusan pengobatan karena tidak memiliki pengetahuan tentang kondisi kesehatan dan penanganan yang tepat sehingga mereka menganggap semua model penanganan sama saja dan mereka memilih dukun, namun setelah mereka mendapat penyuluhan tentang kondisi kesehatannya mereka beralih ke dokter untuk mendapat penanganan yang lebih baik.

3. Peningkatan keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi perempuan sebelum ada program pemberdayaan dikatakan sangat bergantung pada suami, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang istri harus sangat berhemat dalam mengendalikan pengeluaran rumah tangganya. Melalui program pemberdayaan perempuan, istri-istri petani dapat terbantu karena dari kegiatan yang dilakukannya dapat meningkatkan perekonomian rumah tangganya.

4. Peningkatan posisi tawar perempuan

Penghasilan yang didapat perempuan melalui program pemberdayaan dapat membantu perempuan meningkatkan posisi tawarnya dalam keluarga, hal ini karena perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri cenderung tidak bisa mengeluarkan pendapatnya saat membuat keputusan atau bahkan keputusannya tidak dihargai karena dianggap perempuan tidak memiliki andil yang besar dalam kelangsungan

keluarganya. Sedangkan perempuan yang memiliki penghasilan sendiri dapat membantu membuat keputusan karena pendapat perempuan yang memiliki penghasilan lebih dihargai daripada perempuan yang tidak memiliki penghasilan.

5. Membantu menciptakan keadilan gender

Program pemberdayaan yang diadopsi oleh masyarakat tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, tapi juga dapat membantu menciptakan keadilan gender yang mana telah menjadi tujuan pembangunan dari pemerintah. Keadilan gender dapat tercipta dari program pemberdayaan.

E. Tinjauan tentang Kelompok Wanita Tani (KWT)

Hare (1962), membedakan kelompok dengan sekedar kumpulan orang-orang. Dia memberikan suatu definisi yang lebih bersifat operasional. Kelompok merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling tergantung sesuai dengan status dan peranannya. Secara tertulis atau tidak tertulis ada norma yang mengatur tingkah laku anggotanya. Menurut Hare, sifat yang membedakan kelompok dengan sekedar kumpulan orang-orang adalah:

- 1). Anggota kelompok mengadakan interaksi satu sama lain;
- 2). Mempunyai tujuan yang memberi arah gerak kelompok maupun gerak anggota kelompok;
- 3). Membentuk norma yang mengatur ikatan dan aktivitas anggota;
- 4).

Menurut Sajogyo (1983) peran perempuan di bidang pertanian dimulai semenjak orang mengenal alam dan bercocok tanam. Semenjak itu pula mulai berkembang pembagian kerja yang nyata antara laki-laki dan perempuan pada beragam pekerjaan baik di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat luas. Perempuan mempunyai peran ganda yaitu sebagai pembina rumah tangga (sektor domestik) dan pencari nafkah (sektor publik). Keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan sering tidak diperhitungkan.

Wanita merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM), untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan dalam kaitannya mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya sudah tentu pembinaan peranan wanita perlu dilakukan. Wujudnya bisa dilakukan melalui kegiatan bimbingan kepemimpinan untuk kemudian difungsikan dalam pelaksanaan bimbingan keterampilan ekonomis produktif agar potensi sumber daya yang ada disekitarnya dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya (Warga, 2016).

KWT merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang diperuntukkan bagi kaum perempuan, khususnya bagi para ibu rumah tangga. Dalam hal ini KWT diarahkan sebagai usaha untuk menciptakan warga masyarakat yang mandiri, profesional, berdaya, serta mampu mengatasi masalah-masalah yang ditemui dengan potensi yang dimilikinya sebagai usaha peningkatan kualitas hidup anggota kelompok, mengubah realitas kearah yang lebih baik.

Pemberdayaan perempuan berupa program KWT ini disertai dengan pendampingan yang artinya aktivitas yang dapat dilakukan bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok usaha rumah tangga dan petani yang lebih bersifat menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Sistem pendampingan lebih berarti pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan (Rani, 2017). Sehingga pendamping tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu yang terjadi dalam KWT melainkan hanya memberi saran pada anggota kelompok seperti keputusan apa yang harus diambil, sedangkan yang membuat keputusan adalah anggota KWT sendiri.

Menurut Muhadjir (1999), kelompok tani adalah kelompok petani yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena mempunyai keserasian yang sama mengenai tujuan, motif dan minatnya. Sedangkan kelompok wanita tani adalah suatu perkumpulan wanita yang terdiri dari para ibu rumah tangga yang berupaya mengolah hasil pertanian menjadi produk olahan panganan, dan beberapa jenis usaha kecil lainnya. Suharto (2009), mengartikan pemberdayaan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang mengalami kemiskinan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam KWT ditujukan agar perempuan sebagai kelompok lemah yang dimaksud oleh Muhadjir tersebut memiliki posisi tawar yang lebih kuat di keluarganya.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu: masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

1. Ciri ciri kelompok tani

Kelompok tani memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi
- d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama

2. Unsur pengikat kelompok tani

Adapun unsur-unsur yang mengikat dalam kelompok tani antara lain:

- a. Adanya kepentingan yang sama diantara anggotanya
- b. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara anggotanya

- c. Adanya kader yang berdedikasi untuk menggerakkan petani dan kepemimpinannya yang diterima oleh anggota
 - d. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota
 - e. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan
3. Fungsi kelompok tani

Kelompok tani memiliki fungsi antara lain:

- a. Kelompok belajar, kelompok tani merupakan wadah kegiatan belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah, serta kehidupan petani semakin sejahtera
- b. Wahana kerjasama, kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani dengan pihak lain
- c. Unit produksi, usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas.

Salah satu kajian yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat adalah tulisan dari Lestari (2013), dengan judul "*Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPB Mandiri Perkotaan, Studi kasus di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus*". Dengan hasil

penelitiannya yang menyebutkan bahwa partisipasi perempuan dalam pemberdayaan sangat baik dengan mendapat dukungan dari keluarga. Selain perempuan, masyarakat juga terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.

Keikutsertaan perempuan menjadi salah satu contoh bahwa peran perempuan dalam sebuah masyarakat tergolong penting dan dapat membantu mensukseskan pembangunan berbasis pemberdayaan.

KWT memiliki tujuan sebagai berikut: 1). Bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan, 2). Mengatasi persoalan gender, 4). Meningkatkan ketersediaan pangan baik di tingkat lokal maupun global, 5). Memperbaiki tingkat kesehatan serta kebutuhan gizi di dalam rumah tangga, 6). Mengurangi dampak kerusakan lingkungan dengan menganjurkan anggota KWT menggunakan bahan organik untuk merawat tanaman.

Berdasarkan tujuan KWT tersebut, salah satu tujuan utama dari pembentukan KWT adalah meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau. Tujuan akhir ketahanan pangan adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang dapat dilihat dari terpenuhinya hak seseorang atas pangan.

Menurut Sumaryanto (2009), sampai bulan September 2009 sekitar 14,98% penduduk dunia kekurangan bahan pangan (*undernourishment*) dimana perhari rata-rata lebih dari 13.350 orang meninggal karena kelaparan dan kurang gizi. Dalam hal ini, kondisi ketahanan pangan yang rentan menjadi sumber

kemiskinan, sebaliknya karena ia miskin maka ia tidak memiliki ketahanan pangan. Di lain pihak, kemiskinan merupakan isu gender, karena peran sentral wanita dalam manajemen dan kesejahteraan keluarga. Wanita miskin yang paling terkena dampaknya, karena mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya (Mulyani & Mandamhari, 2012)

Salah satu program KWT adalah meningkatkan ketahanan pangan daerah, atau yang lebih kecil setiap rumah tangga memiliki ketahanan pangan sendiri sehingga tidak terjadi kasus kelaparan maupun kekurangan gizi. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan. (Kementerian Pertanian RI Badan Ketahanan Pangan, 2013).

Dalam sosiologi ada tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori tersebut yaitu:

1. Teori Pilihan Rasional

Dalam konsep yang diungkapkan oleh Coleman, ia mengungkapkan bahwa aktor rasional berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Friedman dan Hechter (dalam Ritzer, 2014), Teori pilihan rasional ini memusatkan perhatian pada aktor, yang artinya aktor mempunyai

tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihan aktor.

Teori ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada aktivitas yang dilakukan oleh para anggota KWT. Anggota KWT berperan sebagai actor dalam program pemberdayaan KWT yang bertindak untuk memenuhi kepentingannya masing-masing.

2. Teori Struktural Fungsional

Parsons mempunyai gagasan yang jelas mengenai “tingkatan” analisis sosial maupun mengenai hubungan antara berbagai sistem tingkatan itu. Susunan hierarkisnya jelas, dan tingkat integrasi menurut sistem Parsons terjadi dalam dua cara: pertama, masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi. Kedua, tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya.

Untuk menganalisis peran suami dan isteri dalam keluarga, teori structural fungsional dirasa dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pengambilan keputusan dalam rumah tangga anggota KWT.

3. Teori Feminisme Kultural

Teori feminism cultural memuji aspek positif dari apa yang dilihat sebagai karakter perempuan atau personalitas perempuan. Para teoritis mengatakan bahwa dalam mengatur negara, masyarakat memerlukan nilai-nilai perempuan seperti kerjasama, perhatian, pasifisme, dan penyelesaian konflik tanpa

menggunakan kekerasan (Deegan dan Hill; Donovan; Lengermann; dan Niebrugge-Brantley; dalam Ritzer 2014). Dalam teori institusional, dikemukakan bahwa perbedaan gender berasal dari perbedaan peran yang dimainkan pria dan wanita di dalam berbagai macam *setting* institusional. Penentu utama dari perbedaan adalah perbedaan seksual yang menghubungkan wanita ke fungsi isteri, ibu, dan pekerja rumah tangga, ke ruang privat di rumah dan keluarga dan arena itu menciptakan pengalaman dan peristiwa hidup yang berbeda dari pria (Ritzer, 2014). Motif utamanya adalah pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dalam keluarga.

Teori ini sesuai untuk melihat apakah program KWT berdampak positif terhadap peningkatan peran perempuan dalam keluarganya, sehingga laki-laki dan perempuan dapat memiliki pengalaman yang sama dalam *setting* institusional yang dimaksud.

Beberapa hasil penelitian terdahulu juga mengungkapkan dampak dari adanya pemberdayaan, antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Subagyo (2000)	Efektifitas penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat, studi kasus di kabupaten jawa timur	Menyimpulkan bahwa, program pemberdayaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat. Selain itu program pemberdayaan yang dilakukan berdampak positif terhadap peningkatan kepedulian penduduk kaya dengan penduduk miskin terhadap ketimpangan ekonomi dan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di desa yang diteliti.
2.	Wirya (2009)	Efektivitas dan Dampak Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap Pendapatan Keluarga di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	Memperlihatkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan memberikan dampak positif, pada peningkatan pendapatan keluarga yang berasal dari kaum perempuan.
3.	Widiantara (2011)	Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Jembrana	Mengungkapkan bahwa program pemberdayaan yang berlangsung di tempat penelitian juga memberi dampak positif dalam peningkatan pendapatan keluarga yang berasal dari terdapatnya kesempatan kerja bagi perempuan sehingga perempuan dapat membantu meningkatkan pendapatannya

Sumber: Subagyo (2010), Wirya (2009), dan Widiantara (2011)

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, dapat di simpulkan bahwa program-program pemberdayaan yang dilakukan di desa penelitian memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan keluarga, dalam salah satu penelitian juga diungkapkan bahwa program tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan perempuan.

Pemberdayaan perempuan juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat ketidakadilan gender yang terjadi di Indonesia. Sehingga dampak positif utama yang diharapkan dapat terwujud melalui tercapainya target-target lain dari sebuah program pemberdayaan.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang sedang terjadi, yang didalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertumpu pada fenomena yang terjadi secara objektif, sehingga penelitian ini lebih menggambarkan pada deskripsi data objek penelitian.

Menurut Suyono (1985), penelitian kualitatif adalah penelitian dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta detail secara mendalam mengenai suatu masalah atau gejala itu. Pendapat tersebut sesuai dengan keinginan penulis untuk memaparkan struktur reasi gender dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), maka dari itu tipe penelitian kualitatif dirasa tepat untuk penelitian ini. Menggunakan tipe penelitian kualitatif, penulis berusaha mengetahui secara mendetail untuk mendapat informasi yang dibutuhkan, selain itu penulis juga dapat lebih mendalami yang akan dite;iti.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Latar belakang partisipasi perempuan dalam program KWT
 - a. Proses pengambilan keputusan
 - b. Intensitas partisipasi
 - c. Peran dalam kelompok
 - d. Alasan/ motivasi utama yang mendasari keikutsertaan dalam program KWT
 - e. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga sebelum ikut program KWT
2. Pola pengambilan keputusan
 - a. Pembagian peran suami isteri
 - b. Posisi tawar isteri terhadap suami
 - c. Pola pengambilan keputusan dalam tata laksana rumah tangga
 - d. Pola pengambilan keputusan untuk pembelian barang berharga/ investasi
 - e. Pola pengambilan keputusan untuk hal-hal strategis
 - f. Pola pengambilan keputusan untuk keikutsertaan dalam kegiatan sosial
 - g. Mekanisme pengambilan keputusan
3. Dampak KWT terhadap relasi gender
 - a. Pola relasi gender suami isteri
 - b. Kedudukan suami isteri dalam keluarga
 - c. Peran perempuan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga
 - d. Peran perempuan dalam penjualan produk/hasil

- e. Peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi rumah tangga
- f. Dampak terhadap kesejahteraan anggota keluarga

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada beberapa perempuan yang menjadi anggota KWT, serta beberapa laki-laki yang isterinya merupakan anggota KWT yang berada di Desa Panca Karsa Purna Jaya. Dipilihnya tempat ini sebagai lokasi penelitian adalah karena dirasa dapat mewakili struktur relasi gender dalam program KWT, selain itu program KWT di Desa Panca Karsa Purna Jaya hingga saat ini masih berjalan.

D. Penetapan Informan

Kriteria yang digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini adalah individu yang ikut terlibat langsung dalam kegiatan KWT, yang artinya informan dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa informan mengetahui secara baik dan telah memperoleh manfaat dari proses pemberdayaan yang dilakukan oleh dalam proram KWT. Menurut Spradley (Sugiyono, 2014) agar memperoleh informasi yang akurat, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan informan, antara lain:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tapi juga dipahami.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti, sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2003). Untuk menentukan informan dalam konteks objek penelitian diklasifikasikan berdasarkan kompetensi masing-masing informan. Jenis kelamin dan peran informan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh informasi yang memadai, yaitu:

1. Perempuan yang ikut berpartisipasi dalam program KWT.
2. Pasangan dari perempuan yang ikut berpartisipasi dalam program KWT
3. Pihak-pihak yang terkait dengan program KWT.

Berdasarkan kriteria tersebut, di harapkan dapat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian. Informan yang berpartisipasi dalam program KWT beserta suami yang isterinya ikut berpartisipasi akan dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan peran serta KWT dalam merubah relasi hubungan antara suami dan isteri dalam keluarga. Teknik penentuan informan dimulai dengan menunjuk sejumlah informan, yaitu informan yang mengetahui, memahami dan berpengalaman dengan

objek penelitian ini. Kemudian penulis dapat menentukan informan-informan lain sesuai dengan keperluan dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari sembilan orang, yang terdiri dari lima anggota KWT dan empat suami dari anggota KWT. Berikut rincian profil masing-masing informan:

1. L (38)

Adalah seorang perempuan anggota KWT berusia 38 tahun

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga dapat menjawab dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya didalam rumusan penelitian, maka pengumpul data yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si peneliti dengan si informan dengan menggunakan alat yang *dinamakan interview guide* (panduan wawancara). Setelah mendapat persetujuan dari informan, kemudian peneliti mulai melakukan wawancara. Wawancara dilakukan di masing-masing rumah informan dan pada waktu yang berbeda, wawancara dilakukan di waktu informan memiliki waktu luang agar tidak mengganggu aktivitas informan.

Melalui wawancara mendalam dapat diperoleh data seperti:

1. Latar belakang partisipasi perempuan dalam program KWT
 - a. Proses pengambilan keputusan

- b. Intensitas partisipasi
 - c. Peran dalam kelompok
 - d. Alasan/ motivasi utama yang mendasari keikutsertaan dalam program KWT
 - e. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga sebelum ikut program KWT
2. Pola pengambilan keputusan
- a. Pembagian peran suami isteri
 - b. Posisi tawar isteri terhadap suami
 - c. Pola pengambilan keputusan dalam tata laksana rumah tangga
 - d. Pola pengambilan keputusan untuk pembelian barang berharga/ investasi
 - e. Pola pengambilan keputusan untuk hal-hal strategis
 - f. Pola pengambilan keputusan untuk keikutsertaan dalam kegiatan sosial
 - g. Mekanisme pengambilan keputusan
3. Dampak KWT terhadap relasi gender
- a. Pola relasi gender suami isteri
 - b. Kedudukan suami isteri dalam keluarga
 - c. Peran perempuan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga
 - d. Peran perempuan dalam penjualan produk/hasil
 - e. Peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi rumah tangga
 - f. Dampak terhadap kesejahteraan anggota keluarga

2. Observasi (pengamatan)

Nawawi (1995), mengatakan bahwa metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang dilakukan langsung di tempat suatu peristiwa, yakni keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

Melalui observasi, peneliti mengamati beberapa hal meliputi:

1. Latar belakang partisipasi perempuan dalam program KWT
2. Pola pengambilan keputusan
3. Dampak KWT terhadap relasi gender

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan Fokus permasalahan penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa foto-foto kegiatan yang dilakukan perempuan dalam program KWT.

F. Teknik Analisa data

Menurut Gay (Iskandar, 2010) analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Dengan demikian data atau informasi yang dikumpulkan yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian akan dianalisis berupa pengelompokan dan pengkategorian data dalam aspek-aspek yang telah ditentukan, hasil pengelompokan tersebut dihubungkan dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu kebenaran. Analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data

Langkah pertama dalam analisis data dalam penelitian ini adalah mereduksi data. Karena data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mempermudah mencarinya apabila diperlukan.

2. Penyajian data

Langkah kedua dalam analisis data dalam penelitian ini adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan melalui uraian singkat dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi, merencanakan program selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami dari data yang sudah diperoleh.

Data yang akan disajikan antara lain:

- a. Tingkat partisipasi perempuan dalam program KWT
- b. Peran KWT dalam proses pengambilan keputusan di keluarga
- c. Peran perempuan dalam kelompok
- d. Dampak program KWT terhadap relasi gender dalam keluarga

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Verifikasi adalah pencarian arti, pola-pola dan penjelasan alur sebab akibat. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data yang ada teruji kebenarannya.

Pada tahap ini, dilakukan uji kebenaran pada setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang didapat dari lapangan diklarifikasi kembali, apabila hasil klarifikasi tersebut memperkuat kesimpulan atas data, maka pengumpulan data untuk komponen tersebut siap untuk dihentikan.

G. Validitas dan Reliabilitas Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Penelitian termasuk dalam karya ilmiah, untuk melakukannya mutlak dituntut secara objektivitas, dan salah satu syarat untuk memenuhi kriteria ini adalah dengan terpenuhinya kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas), apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka proses penelitian tersebut perlu dipertanyakan keilmiahannya (Iskandar, 2010).

Menurut Creswell (2012), peneliti perlu menyampaikan langkah-langkah yang ia ambil untuk memeriksa akurasi dan kredibilitas hasil penelitiannya. Reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan

oleh peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain. Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Generalisasi kualitatif terletak pada tema-tema tertentu yang dikembangkan dalam *konteks* lokasi tertentu.

1. Reliabilitas

Data yang akan dicek meliputi:

- a. Tingkat partisipasi perempuan dalam program KWT
- b. Peran KWT dalam proses pengambilan keputusan di keluarga
- c. Peran perempuan dalam kelompok
- d. Dampak program KWT terhadap relasi gender dalam keluarga

Dilakukan dengan cara:

- a. Mengecek hasil transkripsi
- b. Memastikan tidak ada definisi atau makna yang mengambang
- c. Mendiskusikan bersama partner jika penelitian berbentuk tim
- d. Melakukan *cross-check*

2. Validitas

- a. Triangulasi data
- b. Menerapkan *member checking*
- c. Membuat deskripsi yang kaya dan padat
- d. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian
- e. Menyajikan informasi yang berbeda atau negatif yang dapat memberikan perlawanan ada tema-tema tertentu

- f. Memanfaatkan waktu yang relatif lama di lokasi penelitian
- g. Melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti.

3. Generalisasi

Tujuan generalisasi dalam penelitian kualitatif ini sendiri bukan untuk menggeneralisasi hasil penemuan pada individu-individu, lokasi-lokasi atau tempat-tempat di luar objek penelitian, tetapi pada dasarnya lebih kepada deskripsi yang dikembangkan. Generalisasi ini muncul ketika para peneliti kualitatif meneliti kasus-kasus tambahan dan menggeneralisasikan hasil penelitian sebelumnya pada kasus-kasus yang baru tersebut.

Generalisasi dalam penelitian ini meliputi:

- e. Tingkat partisipasi perempuan dalam program KWT
- f. Peran KWT dalam proses pengambilan keputusan di keluarga
- g. Peran perempuan dalam kelompok
- h. Dampak program KWT terhadap relasi gender dalam keluarga

IV. GAMBARAN WILAYAH

A. Sejarah Desa Panca Karsa Purna Jaya

Kampung Panca Karsa Purna Jaya awalnya merupakan pemukiman transmigrasi umum masyarakat yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Penempatan warga transmigrasi dilakukan pada bulan Juli tahun 1978, terdiri dari 2 Rayon dengan jumlah penduduk ± 1.017 jiwa atau sekitar 250 Kepala Keluarga yang menempati lahan seluas 1.802 Ha.

Pada tanggal 24 Desember 1992, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/514/B.III/HK/1992 tentang pengesahan pembentukan Desa Ex.UPT/DT dan pemecahan Desa menjadi Desa persiapan dalam wilayah Kecamatan Pakuon Ratu, Kecamatan Menggala Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, pemukiman Transmigrasi Unit V diserahkan kepada Daerah menjadi Desa persiapan. Pada tahun yang sama, Kampung Kahuripan Jaya dimekarkan dari Kampung Panca Karsa Purna Jaya. Luas wilayah Kampung Panca Karsa Purna Jaya saat itu menjadi ± 1802 Ha dengan jumlah penduduk ± 2.206 jiwa atau sekitar 512 Kepala Keluarga yang terbagi dalam 4 dusun.

Selanjutnya, pada tahun 1994, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/071/B.II/HK/1994 tentang pengesahan Desa-Desa Ex.UPT/DT menjadi Desa Definitif dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kampung Panca Karsa Purna Jaya diubah dari Desa persiapan menjadi Desa Definitif dengan jumlah penduduk ± 2.107 jiwa atau sekitar 476 Kepala Keluarga yang terbagi dalam 4 dusun.

Kemudian pada tanggal 30 Desember 2008, Kampung Panca Mulia dimekarkan dari Kampung Panca Karsa Purna Jaya yang didefinitifkan oleh Bupati Tulang Bawang, H. DR. Abdurrahman Sarbini. SH. MH, MM. Akibat pemekaran tersebut, luas Kampung Panca Karsa Purna Jaya berubah menjadi ± 902 Ha.

Tabel 3. Nama kepala Desa yang pernah menjabat sebagai kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1.	Tumijan	1984-1986
2.	Supingi	1986-1990
3.	Agus M. Fajar	1990-1991
4.	Supingi	1991-1995
5.	Subani	1995-1999
6.	Murdani	1999-2005
7.	Suyudi	2005-2007
8.	Sumarji	2007-2013
9.	Bakri	2013-2019

Sumber: Data Desa Panca Karsa Purna Jaya (tahun 2015)

Program KWT di Desa Panca Karsa Purna Jaya sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 2006, namun kegiatan program KWT sempat terhenti karena partisipasi masyarakat yang sangat minim sehingga mereka malas untuk berkumpul saat diadakan pertemuan kelompok. Tahun 2012 program KWT di Desa Panca Karsa Purna Jaya kembali berjalan hingga saat ini berkat

penyuluhan oleh pihak-pihak terkait mengenai pemanfaatan lahan dan beberapa hal lainnya. Program KWT yang berjalan hingga saat ini terus dipantau oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) tingkat Kecamatan, sehingga setiap kegiatan bulanan yang dilakukan harus dilaporkan oleh ketua KWT kepada BP3K tingkat Kecamatan.

Kondisi relasi gender di Desa Panca Karsa Purna Jaya saat ini umumnya masyarakat tidak membebankan tanggung jawab pada salah satu pihak saja, misalnya isteri yang diharuskan mengerjakan pekerjaan rumah dan suami bekerja di luar rumah. melainkan suami dan isteri saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, seperti suami yang membantu isterinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang dapat dilakukannya seperti menyapu. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan, pada umumnya masyarakat yang ada di Desa Panca Karsa Purna Jaya ketika membuat keputusan yang berkaitan dengan keluarganya mereka melibatkan isteri untuk diajak bermusyawarah, sehingga isteri dapat mengeluarkan pendapatnya mengenai suatu keputusan yang akan diambil, namun semua keputusan akhir suami yang memutuskannya.

B. Letak Desa Panca Karsa Purna Jaya

1. Geografis

a. Batas Wilayah Desa

Letak Desa Panca Karsa Purna Jaya berada di sebelah Timur Ibu Kota Kecamatan Banjar Baru, jarak Desa Panca Karsa Purna Jaya ke Ibu

Kota Kecamatan sekitar 5 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 20 km, batas-batasnya adalah:

- 1) Sebelah Utara : Desa Banjar Agung
- 2) Sebelah Timur : Desa Mekar Indah Jaya
- 3) Sebelah Selatan : Desa Kahuripan Jaya
- 4) Sebelah Barat : Desa Panca Mulya dan Desa Cahyow Randu

b. Luas Wilayah

- 1) Pemukiman : 150 Ha
- 2) Ladang : 736 Ha
- 3) Perkantoran : 500 m²
- 4) Sekolah : 2 Ha
- 5) Jalan : 12 Ha
- 6) Lapangan sepak bola : 1 Ha

c. Orbitrasi

- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 12 Km
- 2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
- 3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 30 Km
- 4) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 30 Menit

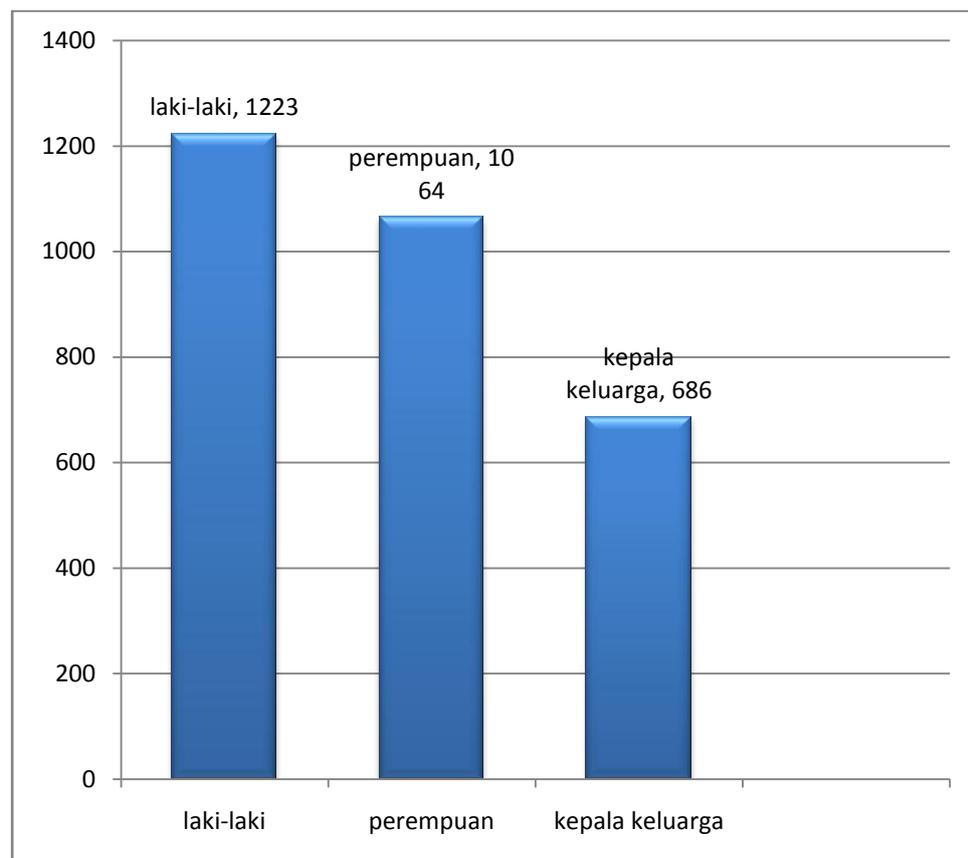
C. Keadaan Penduduk (Demografi)

Kependudukan di Desa Panca Karsa Purna Jaya terdiri dari keadaan penduduk menurut jenis kelamin, keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan, keadaan penduduk menurut mata pencaharian, keadaan penduduk

menurut agama. Keadaan penduduk di Desa Panca Karsa Purna Jaya akan dirinci sebagai berikut:

a. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk di Desa Panca Karsa Purna Jaya lebih di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.



Gambar 3. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin

Sumber: data olahan, 2017

Berdasarkan gambar di atas, didapatkan informasi bahwa:

- 1) Kepala keluarga : 686 KK
- 2) Laki-laki : 1.223 Jiwa
- 3) Perempuan : 1.064 Jiwa

Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur tahun 2015

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	0-4 tahun	108	41	67
2	5-9 tahun	188	90	98
3	10-14 tahun	179	61	118
4	15-19 tahun	264	188	76
5	20-24 tahun	284	157	127
6	25-29 tahun	187	96	91
7	30-34 tahun	259	174	85
8	35-39 tahun	454	261	193
9	40-44 tahun	141	77	64
10	45-49 tahun	89	29	60
11	>50 tahun	134	49	85
	Jumlah	2.287	1.223	1.064

Sumber: Data Desa Panca Karsa Purna Jaya (tahun 2015)

Dari rincian di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 1.223 jiwa dan jumlah yang berjenis kelamin perempuan adalah 1.064 jiwa.

Dengan *sex ratio*:

$$\begin{aligned}
 \text{Sex ratio} &= \frac{\text{laki-laki}}{\text{perempuan}} \times 100 \\
 &= \frac{1.223}{1.064} \times 100 \\
 &= 1,14 \times 100 \\
 &= 114
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan *sex ratio* di atas didapatkan kesimpulan bahwa diantara 100 orang perempuan terdapat 114 laki-laki diantaranya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Panca Karsa Purna Jaya jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dari jumlah perempuan.

b. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

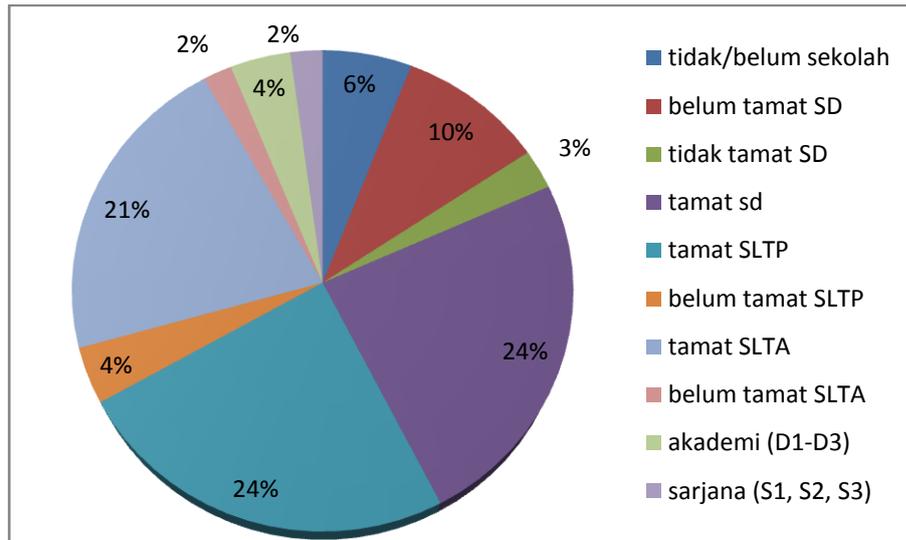
Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Panca Karsa Purna Jaya per tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum sekolah	136 jiwa
Belum Tamat SD	223 jiwa
Tidak Tamat SD	61 jiwa
Tamat SD	551 jiwa
Tamat SLTP	558 jiwa
Belum Tamat SLTP	87 jiwa
Tamat SLTA	486 jiwa
Belum Tamat SLTA	44 jiwa
Akademi (D1-D3)	92 jiwa
Sarjana (S1, S2, S3)	49 jiwa
Jumlah	2.287 jiwa

Sumber: Data Desa Panca Karsa Purna Jaya (2015)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah terbesar penduduk di Desa Panca Karsa Purna Jaya adalah lulusan SLTP yaitu berjumlah 558 jiwa, sedangkan lulusan dengan jumlah terkecil adalah sarjana yaitu berjumlah 49 jiwa. Dengan persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:



Gambar 4. Persentase keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Sumber: data olahan, 2017

c. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

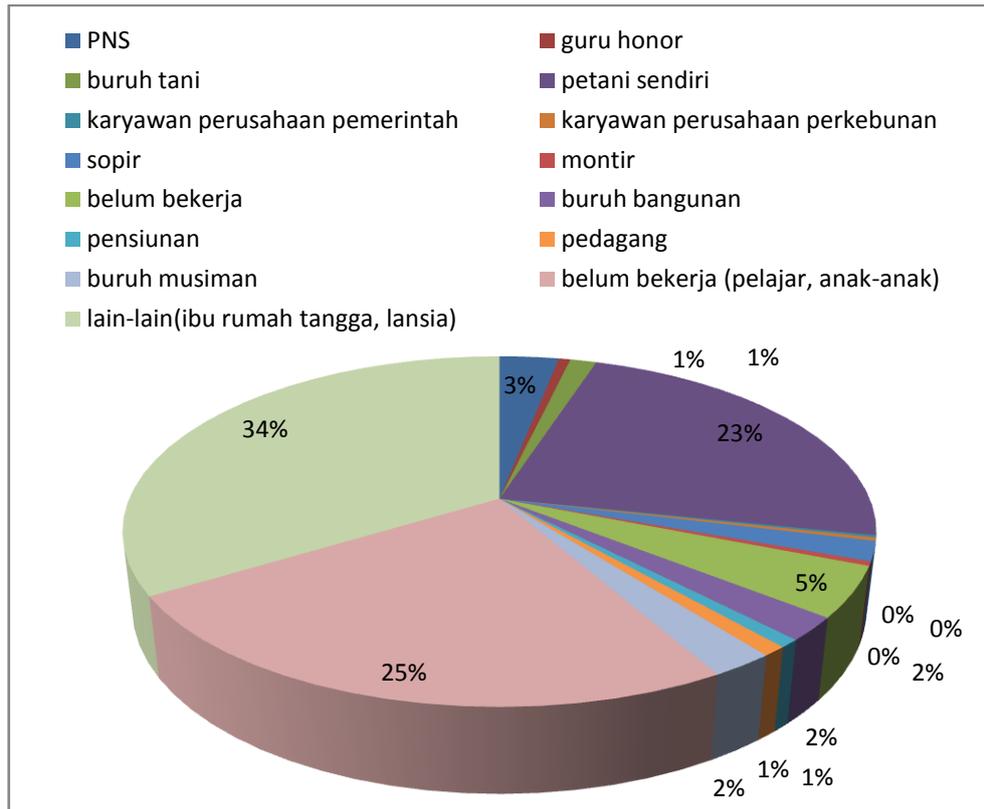
Penduduk di Desa Panca Karsa Purna Jaya mata pencahariannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, petani sendiri, wiraswasta, pedagang, buruh tani, petani penggarap, buruh bangunan, tukang batu, sopir, tukang ojek.

Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Panca Karsa Purna Jaya per Tahun 2015

Mata Pencaharian	Jumlah
PNS	61 orang
Guru Honor	12 orang
Buruh Tani	27 orang
Petani Sendiri	467 orang
Karyawan perusahaan pemerintah	4 orang
Karyawan Perusahaan Perkebunan	6 orang
Sopir	36 orang
Montir	8 orang
Belum Bekerja	93 orang
Buruh bangunan	43 orang
Pensiunan	15 orang
Pedagang	18 orang
Buruh musiman	46 orang
Belum bekerja (pelajar, anak-anak)	490 Orang
Lain-lain	
- Ibu rumah tangga	578 orang
- lansia	97 orang
Jumlah	2.287 Orang

Sumber: Data Desa Panca Karsa Purna Jaya (2015)

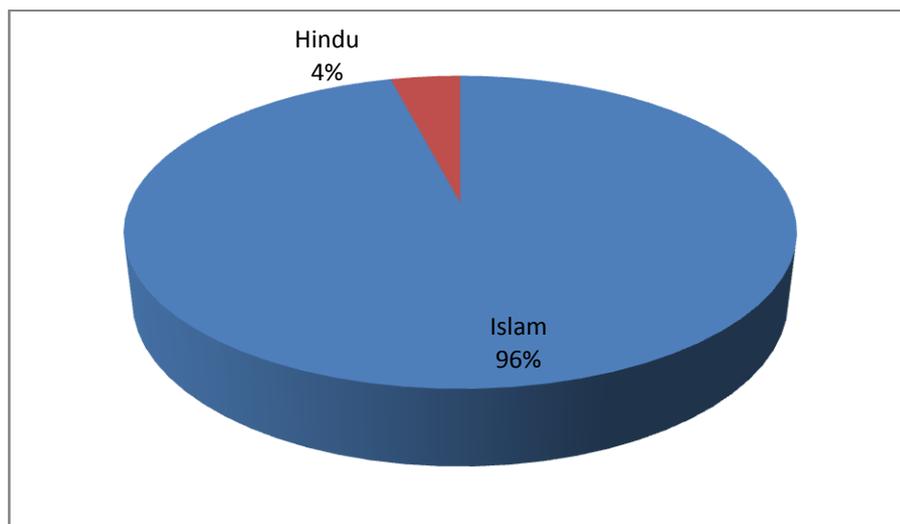
Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas pencaharian penduduk Desa Panca Karsa Purna Jaya adalah petani sendiri yaitu 467 orang dan jumlah terkecil adalah penduduk yang bermata pencaharian sebagai karyawan di perusahaan pemerintah yaitu sebanyak 4 orang. Dengan presentase sebagai berikut:



Gambar 5. Persentase keadaan penduduk menurut mata pencaharian

Sumber: data olahan, 2017

d. Keadaan penduduk menurut agama



Gambar 6. Persentase jumlah penduduk menurut agama

Sumber: data olahan, 2017

Berdasarkan gambar tersebut, didapatkan informasi bahwa masyarakat Desa Panca Karsa Purna Jaya mayoritas beragama Islam yaitu sekitar 96% atau 2.196 jiwa, dan sisanya terdiri dari penduduk beragama Hindu yaitu 4% atau 91 jiwa.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Panca Karsa Purna Jaya

Desa Panca Karsa Purna Jaya memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat di setiap rukun keluarga (RK), yang meliputi sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Fasilitas Pemerintahan

Sarana dan prasarana Desa Panca Karsa Purna Jaya mempunyai kantor kelurahan dan balai Desa dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi beberapa RK, dan tiap-tiap RK membawahi beberapa rukun tetangga (RT). Desa Panca Karsa Purna Jaya mempunyai 6 RK dan 22 RT.

2. Fasilitas Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Panca Karsa Purna Jaya mempunyai sekolah dari TK, SD dan SMA, dengan rincian sebagai berikut:

Desa Panca Karsa Purna Jaya memiliki satu TK dengan nama RA Amanah dan bangunannya dalam kondisi baik, satu SD dengan nama SD N 1 Panca Karsa Purna Jaya dan bangunannya dalam kondisi baik, serta memiliki

satu buah SMA dengan nama SMA N 1 Banjar Baru dan bangunannya dalam kondisi baik.

Dari deskripsi di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan yang ada di Desa Panca Karsa Purna Jaya kurang memadai. Terlihat dari belum adanya sarana pendidikan PAUD, dan SMP yang belum ada di Desa Panca Karsa Purna Jaya ini. Sarana pendidikan yang ada hanya 1 buah TK, 1 buah SD, dan 1 buah SMA yang baru diresmikan tahun 2016.

3. Fasilitas Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Panca Karsa Purna Jaya mempunyai 2 posyandu dengan 12 kader aktif . Untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya, kader-kader posyandu melakukan berbagai kegiatan, diantaranya: melakukan pengobatan gratis, kegiatan pembersihan lingkungan.

4. Fasilitas Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Panca Karsa Purna Jaya mempunyai satu masjid, 7 mushola yang tersebar di tiap-tiap RT dan pura milik pribadi di setiap rumah untuk penduduk yang beragama Hindu.

5. Fasilitas Umum

Desa Panca Karsa Purna Jaya pada saat ini dapat dikatakan sudah berkembang dalam hal kepemilikan fasilitas kendaraan yang bersifat umum untuk masyarakat, ini dibuktikan dengan adanya sarana transportasi minibus sejumlah 34 buah. Perkembangan sarana transportasi ini juga didukung oleh akses jalan yang memadai, sehingga sarana transportasi umum dapat mudah untuk keluar masuk Desa Panca Karsa Purna Jaya.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka pada bagian skripsi ini perlu di rumuskan kesimpulan penelitian sekaligus menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut.

Di Desa Panca Karsa Purna Jaya Kecamatan Banjar Baru terdapat sebuah kelompok pemberdayaan perempuan yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT). Beberapa hal menjadi latar belakang keikutsertaan para perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan KWT, antara lain keinginan perempuan untuk ikut membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya, karena dengan keikutsertaannya dalam kegiatan KWT perempuan dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga walaupun bukan dengan menambah penghasilan untuk keluarganya tapi dengan menghemat pengeluaran keuangan keluarganya.

Program KWT di Desa Panca Karsa Purna Jaya Kecamatan Banjar Baru memberikan dampak positif dan negatif terhadap perempuan. Dampak positifnya yaitu para ibu rumah tangga bisa belajar bercocok tanam, memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayur yang dapat di konsumsi sendiri dan bila panennya berlebih hasil panen tersebut dapat di jual pada

tetangga atau di warung-warung di sekitarnya, hal ini dapat membantu perempuan mendapatkan penghasilan sendiri sehingga perempuan mempunyai tabungan sendiri, kemudian perempuan di beri penyuluhan mengenai cara untuk mengurangi limbah rumah tangga, salah satunya dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman.

Dampak positif lainnya yaitu dapat meningkatkan solidaritas antar warga masyarakat, dengan intensitas waktu berkumpul yang cukup sering perempuan banyak berkumpul dengan teman-temannya sehingga dapat meningkatkan hubungan sosial di masyarakat.

Sedangkan dampak negatifnya yaitu: hingga saat ini program KWT belum mampu memberikan dampak positif secara ekonomi dengan membantu meningkatkan pendapatan keluarga melalui program-program yang dilakukan oleh KWT; Kedua, pemerintah atau dinas terkait yang menangani program pemberdayaan perempuan di Desa Panca Karsa Purna Jaya Kecamatan Banjar Baru belum sepenuhnya berhasil, sebab kegiatan produksi KWT tidak berlangsung secara kontinyu, hal ini di sebabkan sedikitnya permintaan dari konsumen karena harga barang produksi yang ditujukan untuk bahan makanan pengganti jauh lebih mahal dari bahan makanan pokok, sehingga masyarakat kurang berminat terhadap produk makanan pengganti ini.

Beberapa perubahan terjadi dalam rumah tangga peserta program KWT, seperti perubahan terhadap pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Beberapa hal yang mendasari perubahan tersebut antara lain; bagi beberapa informan, setelah isteri ikut program KWT suami perlahan-lahan memberikan

isteri akses untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan sehingga isteri juga dapat memberikan pendapatnya tentang suatu masalah, namun untuk keputusan akhirnya selalu suami yang memutuskan. Namun bagi peserta program KWT lainnya, mereka tidak merasakan perubahan dalam pola pengambilan keputusan bagi keluarganya karena mereka merasa sebelum ikut program KWT, keluarganya selalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang akan diambil dapat diketahui oleh pasangannya.

Selain itu tidak terdapat dampak yang cukup berarti bagi relasi gender dalam rumah tangga, karena dalam hal ini suami juga ikut serta dalam membantu tugas isteri di rumah tangga sebelum isteri ikut program KWT, sehingga menurutnya relasi gender dalam rumah tangganya tidak mengalami perubahan, walaupun isteri ikut serta dalam program KWT.

B. Saran

Beberapa hal perlu disampaikan sebagai saran dalam penelitian ini, yang pertama, pemerintah atau dinas terkait perlu melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap anggota Kelompok KWT agar program dapat berlangsung secara terus menerus. Kedua, belum rutinnnya kegiatan industry rumah tangga menyebabkan KWT hanya melakukan produksi saat ada permintaan hal ini tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian rumah tangga, seharusnya pemerintah melakukan promosi lebih ke masyarakat tentang produk-produk KWT. Program KWT sejauh ini tidak memperlihatkan

dampak bagi relasi gender dalam rumah tangga, karena kurangnya pembinaan tentang pentingnya relasi gender dalam keluarga, sehingga perlunya bimbingan dari pihak-pihak terkait tentang pentingnya pembagian peran yang seimbang antara suami-isteri dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Fauziah Noor. 2013. "*Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Industri Olahan Pisang Uter*". (tesis). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t36916.pdf>. diakses pada 10 Februari 2016
- Anantanyu, Sapja. 2009. "*Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*". (tesis). Bogor: Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/346/2009san.pdf;jsessionid=B577C5266AF63929A10526FD3625A7D2?sequence=4>. Diakses pada 19 November 2016
- Andriyani, Ade. Dkk. 2009. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Keberlangsungan Kegiatan Ekonomi dari Pinjaman Dana Bergulir (studi kasus: Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kelurahan Pancoran Kota Depok)*. (artikel). Depok: Universitas Gunadarma. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_10205015.pdf. diakses pada 13 Desember 2016
- Bustang, Basita G, Sugihen. Margono Slamet, dan Susanto, Djoko, 2008. *Potensi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Perdesaan*, Jurnal Penyuluhan Volume jurnal : 4 Nomor 1 Halaman 39. <http://download.portalgaruda.org>. diakses pada 10 September 2015
- Caplan, Patricia. 1987. *The Cultural Construction of Sexuality*, New York: Routledge <https://books.google.co.id>. Diakses pada 8 Maret 2015
- Creswell, J. W. 2012. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darahim. Andarus. 2003. *Kendala Upaya Pemberdayaan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender*. Makalah. Jakarta : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

- Darwin, Muhadjir dan B. Kusumasari. 2002. *Sensitivitas Gender Pada Birokrasi Publik, dalam Policy Brief*. No. 09/PB/2002, Yogyakarta: Center For Population and Policy Studies
- De Vries, Dede Wiliam. 2006. *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*. Bogor: *Center for International Forestry Research (CIFOR)*.
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BDede0601.pdf. diakses pada 8 September 2015
- Efianingrum, Ariefa. 2008. *Pendidikan dan Pemajuan Perempuan: Menuju Keadilan Gender*, Yogyakarta: Jurnal Fondasia Volume 4
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Artikel%20Fondasia%202008.pdf>.
 Diakses pada 10 September 2015
- Engel, James F., et al., 2005. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani & Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. UMM Press. Malang
- Hare, A.P. 1962. *Handbook of Small Group Research*. Newyork: the free press
- Haryanto, Sindung. 2015. *Proceeding Seminar Nasional Ilmu Sosial Ilmu Politik (SNISIP) FISIP UNS: Rekonstruksi Maskulinitas, Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender*. Surakarta: UNS Press Publishing & Printing
- Hidayah, Nurul. 2012. *"Pemberdayaan Usaha Kecil Berbasis Produk Pertanian"*. (skripsi). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Diakses pada 7 Januari 2016
- IFAD: *enabling poor rural people to overcome Poverty*. 2002-2004. *Empowering The Poor*. "world resources institute"
<http://www.wri.org/publication/content/8329>. diakses pada 9 Maret 2016
- Ilyas, Baharuddin. 2006. *Dampak Tingkat Kesetaraan Gender terhadap Hak Reproduksi dan Fertilitas di Sulawesi Selatan*, *Warta Demografi* Tahun 36, No 2 Th. 2006, Jakarta : Pika Pratama Jaya
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Iswantoro, Chyntia & Anastasia, Njo. 2013. *Hubungan Demografi, Anggota Keluarga dan Situasi dalam Pengambilan Keputusan Pendanaan Pembelian*

Rumah Tinggal Surabaya. Surabaya: Faklutas Ekonomi, Universitas Kristen Petra. Jurnal Finesta Vol 1, No. 2, 125-129

- Jahi, Amri. 1988. *Komunikasi Massa di Negara-Negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia
- Kemen PP dan PA bekerja sama dengan BPS. 2012. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: CV Permata Andhika <http://pdii.lipi.go.id/wp-content/uploads/2013/02/Pembangunan-manusia-berbasis-gender-2012.pdf>. diakses pada 10 September 2015
- Kemen Hukum dan HAM, Kemen PP dan PA, KEMENDAGRI RI. 2011. *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta <http://www.djpp.kemenumham.go.id/files/pkg/bukuPKG.pdf>. diakses pada 10 September 2015
- Kertati, Indra. 2015. *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Kota Semarang*. Riptek Vol. 9, No. 1, Tahun 2015, Hal. 33-48 <http://bappeda.semarangkota.go.id/packages/upload/kcfinder/upload/files/4.%20indra%20-%20gender.pdf>. Diakses pada 10 Januari 2016
- King, Elizabeth M dan Mason, Andrew D et.al. 2001. *Rangkuman Penelitian Pembangunan Berperspektif Gender: melalui Kesetaraan Gender dalam hak, Sumber Daya dan Aspirasi*. Jakarta: World Bank. <http://www.worldcat.org/title/rangkuman-pembangunan-berperspektif-gender-melalui-kesetaraan-gender-dalam-hak-sumber-daya-dan-aspirasi-laporan-penelitian-kebijakan-bank-dunia/oclc/66154939>. diakses pada 10 September 2015
- Krisnawati, Y.A. 2014. *Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan*. Fakultas Ilmu Sosial Negeri Malang. <http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikelC9CDD3A470BFB5675F342F1C59BEBA28.pdf>. dikases pada 20 Januari 2016
- Lestari, A.M. 2013. *Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPMM Mandiri Perkotaan*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial
- Mardikanto T, Soebianto P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Marzuki, Abdul Gafur. *Gender dalam Perspektif Kesetaraan dan Keadilan* Musawa, Vol. 3, No. 2, Desember 2011: 205-220 <http://webcache.googleusercontent.com>. Diakses pada 7 September 2015

- Moeljarto, T. (1987). *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa Women's Crisis Centre
- Muhadjir, Noeng. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasih
- Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Graededia Pustaka Utama. Cet. I.
- Mulia, Siti Musdah, et al. 2003. *Keadilan dan Kesetaraan Gender; Perspektif Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Mulyani, Altri & Mandamnari, Alpha Nadeira. 2012. *Peran Wanita Tani dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Cilongok)*. Jurnal SEPA: Vol. 8 No.2. Pebruari 2012. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman
- Mustika, Amalia., dkk. 2013. *Pola pengambilan keputusan serta peran dan curahan kerja wanita dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di daerah tujuan wisata*. Jurnal Ilmiah Pariwisata. Vol 18, No 3. <http://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/view/28>. diakses pada 20 November 2016
- Muthali'in, Achmad. 2001. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Nawawi, H. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Noerhadi, Toeti H. 1998. *Mitra Seajar Dalam Pembangunan: Tantangan Atau Jebakan*. Jurnal Perempuan. No.5. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2014. *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)*. Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) <http://www.kemenpppa.go.id> diakses pada januari 2016
- Oakley, Ann. 2015. *Sex Gender and Society*. England Ashgate <http://blog.ashgate.com/2015/03/05/sex-gender-and-society-a-guest-post-from-ann-oakley/>. Diakses pada 7 September 2015
- Olson, D. H. & Fowers, B. J. 1989. *Enrich Marital Inventory : A Discriminant Validity and Cross-Validity Assesment*. Journal of Marital and Family Therapy, 15 (1)

- Pasaribu, Vera A.R. 2009, *Perempuan dan Pembangunan Nasional Indonesia*, Medan: karya Ilmiah FISIP universitas NOMMENSEN <http://perpustakaan.uhn.ac.id/adminarea/dataskripsi/Karya%20Ilmiah%20-%206.pdf>. Diakses pada 9 Februari 2016
- Peter, J. Paul dan Jerry C Olson. 2002. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga
- Putra, I Gusti Putu. 2015. *Efektivitas Dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung*. Denpasar : (Tesis) Program Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Ekonomi http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1305-462155999-igustiputuputra.pdf. diakses pada 10 Februari 2016
- Putri, Dyah PK & Lestari, Sri. 2015. *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Isteri Jawa*.(artikel). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol, 16. No 1, Februari 2015: 72-85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/viewFile/1523/1056> diakses pada 19 November 2016
- Rani, Lina Nugraha. 2017. *Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Perbankan terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2003- Oktober 2015* Volume 1 Nomor 1, Januari 2017. E. ISSN2548- ,P-ISSN 2549-0850. Halaman 41-58 A1-Uqud: Journal of Islamic Economics (Prodi Ekonomi Syariah, Fak. Ekonomi Universitas Negeri Surabaya)
- Reeves, Hazel and Baden, Sally. *Gender and Development: Concepts and Definitions, BRIDGE (development - gender) Institute of Development Studies University of Sussex Brighton BN1 9RE, UK, 2000* <http://http://webcache.googleusercontent.com>. Diakses pada 7 Januari 2016
- Rencana Pembangunan Tahunan. 2001. Sekretariat Negara RI. <http://jdih.jabarprov.go.id/files/regulations/2000/UU%2035-2000.pdf>. Diakses pada 25 Oktober 2015
- Riches. C.1990. Gender and School Management. Dalam Saran & Trafford, V. (Eds). *Research in Educational Management and Policy: Restropect and Prospect*. London: The Farmer Press.
- Riyono, Bagus. 1997. *Sistem Manajemen yang Manusiawi*. dalam Buletin Psikologi. Tahun V. No. 1. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Grup

- Sajogyo dan Sajogyo, Pujiwati. 1983. *Peranan Wanita Dalam Keluarga Rumah Tangga Dan Masyarakat Yang Lebih Luas Di Pedesaan*. Jakarta: CV Rajawali
- Sajogyo, P. 1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV. Rajawali
- Saptandari, Pinky. 1999. "Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan," *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Th XII. No 2. April 1999. hh 33-38
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-07-PINKY.pdf>. diakses pada 7 September 2015
- Sari, Rika Puspita. 2011. "*Peranan Bantuan Program Penguatan Modal Usaha Terhadap Usaha Pengolahan Pisang Pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Maju Bersama di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar*". (skripsi). Padang: Universitas Andalas.
http://repository.unand.ac.id/17501/1/skripsi_rika.pdf. diakses pada 10 Februari 2016
- Schiffman, Leon G & Leslie, Lazar Kanuk. 2004. *Perilaku Konsumen*. Alih Bahasa Oleh Zoelkifli Kasip. Edisi Ketujuh. Jakarta: PT. Indeks Gramedia.
- Setyoaji, Radika Wahyu. 2012. *Dampak Program Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Dusun Sosoran Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung*. Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
<http://eprints.uny.ac.id/27143/1/Radika%20Wahyu%20Setyoaji.pdf>.
 Diakses pada 10 Februari 2016
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Showalter, Elaine (ed.) (1989). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge
http://www.jstor.org/stable/1347083?seq=1#page_scan_tab_contents.
 Diakses pada 7 September 2015
- Sopandi, andi. 2008. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal madani edisi II/ 2008
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19455&val=1230>.
 Diakses pada 3 Maret 2016

Besed Sexual and Reproductive Health Care. Progress in Reproductive Health Research, (online) No 71. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/progress_71.pdf

Warga, I Made. 2016. *Pengaruh Pendapatan Anggota Usaha Kelompok Wanita Tani :Satya Wacana” Terhadap Pendapatan Keluarga di Banjar Dinas Tukad Tiis Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem Taun2014*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi. Vol 6 Nomor 1 Tahun2016
<https://ejournal.undiksha.ac.id> diakses pada 8 September 2015

Wariyanto. 2003. *Mereduksi Ketidakadilan Gender*. Online: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0303/08/kha1.html>. diakses pada 7 September 2015

Who. 2010(*World Health Organization (WHO)*). *Integrating Gender into HIV Programmes in the Health Sector: Tool to Improve Responsiveness to Women’s Needs*. Geneva, WHO. 2009. http://www.who.int/gender/documents/gender_hiv_guidelines_en.pdf. diakses pada 2 Oktober 2015

Widiantara,I Putu. 2011. *“Efektivitas Dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Jembarana”* (tesis). Denpasar : Universitas Udayana

Wirya, I Wayan. 2009. *“ Efektivitas dan Dampak Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap Pendapatan Keluarga di Kecamatan Kuta Utara “* (tesis). Denpasar : Universitas Udayana

Zuhrah, Fatimah. 2013. *“ Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim”*. Jurnal Multikultural & Multi Religius Vol 12. Diakses pada 20 November 2016

Internet

BAPPENAS. 2012. <http://rb.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2014/02/Permen-PPN-No.-5-Tahun-2012.pdf>. diakses pada 11 September 2015

BKN. 2012. <http://www.bkn.go.id> 9 September 2015

BPS. 2015. <http://lampung.bps.go.id> diakses pada 9 September 2015

Kementrian Pertanian RI Badan Ketahanan Pangan. 2013. *Pedoman Pelaksanaan (Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan P2KP)*. Jakarta: Kementrian RI

Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2013
<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-2013.pdf> diakses pada 21 April 2016

Sakernas. 2012. Indonesia – Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 Triwulan 1
<http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/3>. diakses pada 8 Februari 2016

SDKI Lampung. 2014. <http://www.depkes.go.id> diakses pada 9 september 2015

Susenas. 2012. Indonesia - Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 Triwulan 1
<http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/87>. diakses pada 8 Februari 2016

Susenas. 2010. Indonesia - Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010 semester 1 (Panel) <http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/128>. diakses pada 8 Februari 2016